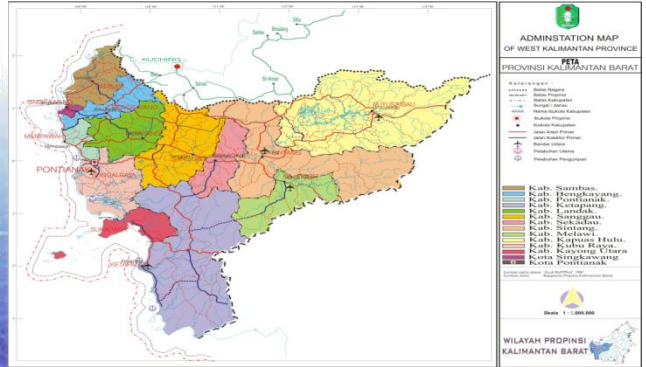




Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat



“Industri Maju & Perdagangan Tangguh untuk
Pertumbuhan, Pemerataan dan Kesejahteraan

Rencana Strategis 2013 - 2018

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 108 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 – 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 maka sebagai penjabarannya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranstra SKPD) Tahun 2013-2018 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD.
- b. bahwa dokumen Renstra SKPD merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang dilaksanakan SKPD selama periode pelaksanaan Renstra
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 375/BAPPEDA/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013-2018
- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan ini disusun dengan sistematika sebagaimana berikut ini.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS .

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DAERAH (RPJMD)

BAB VII : PENUTUP

- KEEMPAT : RENSTRA sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sampai KETIGA wajib menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan menyusun Rencana Kerja Tahunan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT dalam kurun waktu tahun 2013-2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di: P o n t i a n a k

Pada Tanggal : 26 September 2013

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (RENSTRA) Industri dan Perdagangan Tahun 2013 - 2018 telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap lima tahun setelah Rancangan RPJMD Kalbar 2013-2018 disusun. RENSTRA ini merupakan acuan utama bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan program pembangunan di sektor industri dan perdagangan selama tahun 2013-2018 dalam mendukung pembangunan Kalimantan Barat, dimana tahun 2013 merupakan tahun transisi antara pelaksanaan RENSTRA 2008-2013 dengan RENSTRA 2013-2018.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan Dinas Perindag Provinsi Kalbar dan fokus (menitikberatkan) pada upaya pencapaian target-target RPJMD Provinsi Kalbar 2013 – 2018 (Perda 5 tahun 2013), namun juga dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025 (UU no 17/2007) dan RPJMN 2010 – 2014 (Perpres 5/2010) serta mempertimbangkan Rencana Strategis yang disusun oleh Kementerian Terkait (2010 – 2014), dalam hal ini Kementerian Perindustrian R.I. dan Kementerian Perdagangan RI. Selanjutnya untuk menghindari permasalahan keruangan (spasial) serta untuk sinergi antar wilayah dan didalam wilayah, maka Penyusunan Rencana strategis ini juga mengacu pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Kalimantan, dan Revisi RTRW Provinsi Kalbar.

RENSTRA ini juga mengakomodir Kebijakan Nasional dalam pengembangan Industri sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dan Perpres no. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Perpres no. 28 tahun 2008 beserta Peraturan Menteri Perindustrian no 134/2010 tentang Peta Jalan Industri Unggulan Provinsi Kalbar 2010-2025 telah menetapkan Komoditi Unggulan Provinsi Kalbar adalah Karet dan Kelapa Sawit untuk dikembangkan industrinya untuk kurun waktu 2010 – 2025. Dan berdasarkan Perpres 32/2011, industri yang dikembangkan di Kalbar adalah industri alumina dalam koridor Mempawah dan Kalimantan Barat sangat berperan dalam pembangunan Konektivitas Nasional. RENSTRA ini juga telah disusun untuk upaya mengantisipasi pemberlakuan liberalisasi ekonomi ASEAN melalui pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean / Asean Economic Community (AEC) 2015.

Sebagai amanat partisipasi publik dalam penyusunan RENSTRA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka telah dilakukan Forum SKPD penyusunan RENSTRA ini pada bulan April 2013 yang diikuti oleh pemangku kepentingan dari DPRD Provinsi, Pemerintah Pusat, Kab/kota, Provinsi, Dunia usaha, LSM terkait Indag, dan Akademisi. Selanjutnya Misi pembangunan perindustrian dan perdagangan 2013-2018 ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait,

oleh karena itu Dinas Perindag Provinsi Kalbar akan melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga pembangunan Perindag 2013-2018 dapat dilaksanakan dengan optimal.

Akhirnya, semoga RENSTRA 2013-2018 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana dilingkungan Dinas Perindag Provinsi Kalbar dalam melakukan tugasnya. Semoga RENSTRA pembangunan industri dan perdagangan tahun 2013-2018 dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh rakyat Kalbar. Amiin

Pontianak, 26 September 2013

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Gambaran Umum	4
Bab III. Isu-Isu Strategis	16
Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	29
Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, serta Indikator Kinerja.	37
Bab VI. Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)	44
Bab VII. Penutup	59

Lampiran

Lampiran I	Matrik Pendanaan Indikatif Program dan Target Kinerja 2014 – 2018 (Dinas Perindag Provinsi Kalbar)
Lampiran II	Matrik Pendanaan Indikatif Program dan Target Kinerja 2014 – 2018 (UP Kemetropolitan Pontianak)
Lampiran III	Matrik Pendanaan Indikatif Program dan Target Kinerja 2014 – 2018 (UP Kemetropolitan Singkawang)
Lampiran IV	Matrik Pendanaan Indikatif Program dan Target Kinerja 2014 – 2018 (UPSMB Pontianak)
Lampiran V	Matrik Pendanaan Indikatif Program dan Target Kinerja 2014 – 2018 (UPIKM Provinsi Kalbar)

1.1. Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak dan merupakan salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dinas ini adalah salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di daerah Kalbar yaitu Sektor Industri dan Perdagangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Kalimantan Barat dimana lebih dari 40 persen PDRB Kalbar berasal dari kedua sektor ini. Kedua sektor ini juga memegang peranan strategis di Kalbar terkait liberalisasi ekonomi regional dalam payung ASEAN dimana pada 1 Januari 2016 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean/Asean economic Community (MEA/AEC) 2015.

Sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (TUPOKSI) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat ; dan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2008 yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dan diundangkan di Pontianak pada tanggal 7 November 2008 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perindag Provinsi Kalbar, diharapkan SKPD ini dapat mengemban tugas-tugas pemerintahan di bidang industri dan perdagangan terutama dalam mencapai target-target pembangunan baik di tingkat Provinsi maupun nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat setiap lima tahun perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dijadikan pedoman dalam dasar pelaksanaan kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantu dibidang industri dan perdagangan yang menjadi kewenangan di Provinsi Kalimantan Barat. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 -2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. RENSTRA ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas bagi Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Penyusunan Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran target-target RPJMD Provinsi Kalbar 2013 – 2018 dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN & RPJMN serta mempertimbangkan Rencana strategis yang disusun oleh kementerian Terkait di pusat, dalam hal ini kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan RI. Selanjutnya dengan terbitnya undang-undang penataan ruang, untuk menghindari permasalahan keruangan dan untuk sinergi antar wilayah dan didalam wilayah, maka Penyusunan Rencana strategis juga harus mengacu pada RTRW Provinsi Kalbar, RTRW Pulau Kalimantan dan RTRW Nasional dan juga diharapkan mempunyai andil dalam pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)¹ yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden .

Agar RENSTRA dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditujukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat saja, melainkan juga seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Stakeholder lainnya yang ada di Povinsi Kalimantan Barat. RENSTRA ini juga merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik ekonomi maupun sosial-budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan review dan jika perlu dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat ;
16. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat
17. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 - 2018
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perindag Provinsi Kalbar.;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 disusun sebagai acuan resmi bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan SKPD yang akan dibahas dalam rangkaian forum

musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang untuk Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2014 hingga 2018.

Oleh karena itu, isu dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD provinsi melalui DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan barat. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan APBN.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan yaitu tahun 2014 dan 2018.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA STRATEGIS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan barat Tahun 2013-2018 adalah :

- 1) Sebagai bahan rujukan/ acuan dalam penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun 2014 sd 2018.
- 2) Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja satuan kerja perangkat daerah 2014 sd 2018.
- 3) Membangun partisipasi stakeholder Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan barat dalam perencanaan pembangunan tahun 2013 sd 2018.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sd 2018.

1.4.. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 - 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, uraian tugas dan fungsi serta hal-hal yang dianggap penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, tentang kondisi daerah yang terkait dengan bidang industri dan perdagangan masa kini dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan sebagaimana yang dimaksud dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Industri dan Perdagangan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD kedepan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi SKPD, telaahan atas visi, misi dan program utama kepala daerah, telaahan atas Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, Telaahan atas RTRW beserta KLHS Kalbar untuk menentukan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018. Visi dan misi ini adalah pedoman dan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan barat. Startegi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan arah yang diambil dalam menentukan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA.

Bab ini berisi uraian program dan kegiatan beserta indikator kinerja utama serta indikasi pendanaan, sumber dan indikasi pendanaan, baik yang berasal dari APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode 5 (lima) tahunan dan tahunan.

BAB VI.INDIKATOR KINERJA DAERAH (RPJMD)

Bab ini memuat keterkaitan Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII.PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan arti penting RENSTRA bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat serta catatan dan harapan Kepala Dinas dimasa yang akan datang.

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no 49 Tahun 2008 tugas pokok dan fungsi Dinas Perindag Provinsi Kalbar adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengkoordinasikan dan fasilitas kegiatan dibidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pengendalian kegiatan di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan pada kabupaten/kota

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tidak terlepas dari kewenangan Provinsi untuk urusan industri dan perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota. Struktur Organisasi Disperindag Provinsi Kalbar sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no 49 Tahun 2008 adalah sbb :

Gambar 1. Struktur Organisasi Disperindag Provinsi Kalbar



Sumber daya Disperindag

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) orang dengan formasi sebagaimana data dibawah ini..

Tabel 2.1.

**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
(per 31 Juli 2013)**

No	Bidang / UPT	Jlh Pega-wai	Eselon			Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
			II	III	IV	I	II	III	IV	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	87	1	5	15	1	20	56	10	10	31	6	37	1	2
2	UPSMB	23		1	3	2	1	19	1	1	10	1	9	2	0
3	UP Kemetrolgian Pontianak	26		1	3	0	8	16	2	1	9	5	11	0	0
4	UP Kemetrolgian Singkawang	9		1	2	1	2	6	0	0	2	0	6	1	0
5	UP IKM	17		1	3	0	1	15	1	0	5	4	8	0	0
Total		162	1	9	26	4	32	112	14	12	57	16	71	4	2

Sumber Data :Kepegawaian Disperindag, Juli 2013

Per 31 Juli 2013 sumber daya manusia Dinas Perindag berjumlah 162 pegawai, hal ini disebabkan adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiun sebanyak 4 orang, pindah ke instansi lain sebanyak 1 orang serta terdapat pegawai baru/pindahan sebanyak 1 orang.

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Kalbar terdapat 17 orang sebagai Pejabat Fungsional yaitu :

- UPSMB sebagai tenaga Penguji Mutu Barang sebanyak 7 orang.
- UP. Kemetrolgian Pontianak sebagai tenaga Penera (dalam berbagai tingkatan) sebanyak 7 orang dan terdapat 5 (lima) orang yang telah mengikuti diklat fungsional penera.
- UP. Kemetrolgian Singkawang sebagai tenaga Penera sebanyak 2 orang.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai tenaga Arsiparis Penyelia sebanyak 1 orang.

Sampai dengan tahun 2013 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat masih membutuhkan tenaga teknis yang terdiri dari:

- Tenaga Penera Terampil dibutuhkan 12 orang (UP Kemetrolgian Pontianak 10 orang dan UP Kemetrolgian Singkawang 2 orang).
 - Untuk UP Kemetrolgian Pontianak telah terisi 5 orang penera terampil dan 5 orang telah dicalonkan dan dididik sebagai penera terampil.
 - Untuk UP Kemetrolgian Singkawang telah terisi 2 orang penera terampil.

- Tenaga Penera Ahli dibutuhkan 8 orang (UP Kemetrolgian Pontianak 6 orang dan UP Kemetrolgian Singkawang 2 orang).
 - o Untuk UP Kemetrolgian Pontianak telah terisi 2 orang penera ahli dan calon penera ahli 1 orang, sehingga masih diperlukan 3 orang penera ahli.
 - o Untuk UP Kemetrolgian Singkawang masih belum memiliki tenaga penera ahli sehingga masih dibutuhkan 2 orang penera ahli dengan pendidikan minimal S1 teknik mesin atau teknik elektro

- Tenaga Pranata Komputer yang dibutuhkan sebanyak 9 orang dengan pendidikan minimal D3 komputer yang direncanakan terisi 1 orang pada tahun 2014 melalui penerimaan CPNS Pemda Provinsi Kalbar tahun 2013 masih dibutuhkan 8 orang.

- Tenaga Akuntansi yang dibutuhkan sebanyak 5 orang dan telah terisi 1 orang sehingga kekurangan tenaga tersebut sebanyak 4 orang dengan pendidikan minimal D3 Akuntansi.

- Tenaga kearsipan yang dibutuhkan sebanyak 3 orang dan telah terisi 1 orang sehingga kekurangan tenaga tersebut sebanyak 2 orang dengan pendidikan minimal D3 Kearsipan.

- Tenaga Penguji Mutu Barang terampil yang dibutuhkan sebanyak 11 orang dan telah terisi sebanyak 6 orang ahli (4 orang fungsional Penguji mutu Barang/PMB ahli dan 2 orang calon fungsional Penguji mutu Barang ahli) dan 3 orang fungsional PMB terampil sehingga masih kekurangan tenaga tersebut sebanyak 2 orang fungsional PMB terampil dengan pendidikan minimal D3 Analis/Fisika/Kimia.

- Tenaga Fungsional Penyuluh industri yang dibutuhkan sebanyak 6 orang (2 orang di UPIKM Pontianak dan 4 orang di Dinas Perindag) dan telah dicalonkan dan dididik sebanyak 2 orang sehingga kekurangan tenaga tersebut sebanyak 4 orang dengan pendidikan minimal S1 Teknik Industri.

Dari sisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menempati kantor di jalan Sutan Syahrir no. 2 Pontianak, kondisi kantor Dinas Perindag untuk saat ini sudah mengalami perluasan sehingga kondisi kerja sudah terasa agak nyaman karena sudah dapat menampung para pegawai yang ada secara layak sehingga pelayanan umum yang diberikan pun sudah tidak terganggu lagi. Namun masih ada beberapa

ruangan yang harus di perbaiki dan juga memerlukan beberapa Meja dan Kursi untuk penunjang kerja.

Sarana mobilitas dan operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang masih kurang untuk menunjang kegiatan – kegiatan dinas, maka telah direalisasikan penambahan masing – masing satu unit kendaraan roda empat dan roda dua yang tertampung pada RKA tahun anggaran 2013. Sedangkan untuk peralatan komputer beserta perangkat penunjangnya seperti UPS telah diajukan juga penambahannya yang tertampung pada RKA tahun anggaran 2013. Selain komputer built up standar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat juga mengajukan pengadaan komputer atau PC Grafis dan GPS untuk mendukung penyusunan dan pengolahan data spasial.

Untuk saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat masih memerlukan tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk penataan dan penyimpanan arsip kantor yang selama ini belum tersusun dengan baik sehingga mengakibatkan banyak arsip kantor yang hilang atau kesulitan dalam mencari arsip lama.

Sedangkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan didukung dengan anggaran dari **APBD Provinsi dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI**. Disamping diperkuat oleh UPTD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat juga ditunjang oleh peran instansi vertikal Kementerian Perindustrian di daerah Kalimantan Barat baik melalui hubungan koordinasi langsung dan tidak langsung. Instansi vertikal di daerah tersebut yaitu :

1. Badan Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan (Baristand Indag Pontianak)
2. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Pontianak.

Kinerja Pelayanan Disperindag

Untuk mengetahui kinerja pelayanan industri dan perdagangan di masa lalu (2009 – 2012) dapat dilihat pada tabel Capaian Sasaran Berdasarkan IKU Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov. Kalbar berikut ini. Dan telah menunjukkan beberapa keberhasilan yang dicapai, walaupun ada beberapa indikator yang belum cukup memuaskan

TABEL 2.2. CAPAIAN SASARAN BERDASARKAN IKU RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KALBAR
 CUPLIKAN SK KADIS PERINDAG PROV. KALBAR NO. 220 TAHUN 2010 TENTANG IKU DILINGKUNGAN DINAS PERINDAG PROV. KALBAR

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalimantan Barat	1 Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar Per tahun	%	1,25	1,1	1,0	2,21	1,79	2,6	2,76	3,1	2,76	Bid IKAHH	
2	Tumbuh dan berkembangnya IKM Kalimantan Barat	2 persentase jumlah pertumbuhan IKM Kalbar	%	3,00	3,84	4,00	4,44	4,50	4,00	4,70	4,80	4,70	Bid ILMEA	
		3 jumlah IKM Kalbar yang mendapatkan penghargaan, baik skala nasional, maupun internasional	Unit	1	2	2	3	2	2	2	3	1	Bid ILMEA	IKM yang mendapatkan penghargaan Upakarti dan atau penghargaan nasional lainnya
3	Peningkatan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	4 Laju inflasi Kalimantan Barat	%	4,08	4,91	5,76	8,52	4,22	5,22	4,47	6,62	5,47	Bid. Dagri	
4	peningkatan dan perlindungan konsumen	5 persentase jumlah pengaduan konsumen	%	100%	7,1%	100%	21,4%	100%	100%	100%	175%	100%	Bid. Dagri	
			jlh aduan	14	1	14	3	14	14	20	35	40		
5	peningkatan ekspor daerah dan pengendalian impor	6 persentase pertumbuhan nilai ekspor dan impor Kalimantan Barat	%	5 - 10	-40 (minus)	12%	-8,35%	12%	65,76%	12%	3,10%	12%	Bid. Daglu	
			US\$ Juta			1,126.79	922.05	1,262.01	1,867.80	1,413.45	1,303.86	1,583.06		

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha	7 Akreditasi Laboratorium UPT di lingkungan Dinas perindag	ruang lingkup (RL)	1 lab 5 RL	1 lab 5 RL	1 lab 5 RL	1 lab 5 RL, 1 lab persiapan	1 lab 5 RL, 1 lab penilaian akreditasi, 1 lab penambahan akreditasi RL	3 lab terakreditasi (UPSMB, 2 UPT Kemetrolgian) Penambahan ruang lingkup akreditasi lab Kalibrasi UPSMB	1 lab 5 RL, 1 lab penilaian akreditasi, 1 lab penambahan akreditasi RL	1 lab 5 ruang lingkup	1 lab 5 RL, 1 lab penilaian akreditasi, 1 lab penambahan akreditasi RL	Metrologi SKW, Metrologi PNK, UPSMB	
		8 Jumlah peningkatan pengujian komoditi	Komoditi	3	3	3	3	4	3	4	3	3	UPSMB	
		9 jumlah peningkatan peralatan yang ditera	Unit	30.000	30.489	31.000	30.796	31.500	31.953	31.500	25.445 (Metrologi Ptk = 17.704 ; Metro Skw = 7,741)	31.500	Kemetrologian	

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Kalbar, 2013

Kegiatan Perlindungan Konsumen Kalimantan Barat masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP), PPNS Kemetrolagian dan Pengamat Tera . Penyebab lainnya adalah belum adanya UPTD Kemetrolagian yang dimiliki oleh Kab/Kota serta lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka perlindungan konsumen yang kewenangannya ada pada Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2012 baru tiga kab/ kota yang telah ditelaah dikeluarkan keputusan dibentuknya BPSK yaitu Kota Pontianak, Singkawang dan Kab. Ketapang. Selain penambahan SDM untuk PPBJ, PPNS-PK, PPNS TDP, untuk tahun 2013 diperlukan upaya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan cerdas, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan jasa.

Adanya resesi ekonomi global di beberapa belahan dunia utamanya Eropa dan Amerika pada tahun 2012 secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pencapaian target kinerja indikator utama diatas bahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengubah kondisi yang diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi menjadi 5,95% pada tanggal 1 Maret 2012 melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012. Secara langsung dampak resesi ekonomi terjadi pada ekspor Kalimantan Barat pada tahun 2012 (Januari s/d Desember) yang turun pertumbuhannya (yoy) sebesar 30,19 persen (Berita Resmi Statistik No.07/02/61/Th.XVI, BPS Provinsi Kalimantan Barat 2013) dari yang ditargetkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 12%. Selain dari dampak resesi ekonomi global, penurunan ekspor ini juga dipengaruhi oleh turunnya harga karet di tingkat dunia serta adanya Permen ESDM no. 7 Tahun 2012 pasal 21 yang tidak diperbolehkannya mengekspor hasil tambang dalam bentuk mentah/bijih/ raw material. Disisi lain lain pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC 2015) yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2016 akan memberikan ancaman sekaligus peluang bagi pengembangan dunia usaha di Kalimantan Barat, terlebih lagi dengan letak geografis Kalbar yang berada di pusat Negara-negara ASEAN dan mempunyai perbatasan darat dengan Malaysia.

Untuk itu pemerintah daerah berupaya meningkatkan pelayanan ekspor – impor melalui e-SKA dan API online pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar pada tahun berikutnya. Selain itu dengan dukungan Kementerian Perdagangan beserta Atase Perdagangan telah dilakukan upaya-upaya mencari informasi dan potensi pasar internasional terhadap komoditi-komoditi Kalbar dalam bentuk profil komoditi utama Kalbar atau “Market Brief” yang diikuti promosi dagang yang representatif untuk mengenalkan produk Kalbar di pasar. Untuk jangka pendek

hingga menengah, Pemerintah Daerah akan berupaya agar potensi CPO Kalbar sekitar 1 juta ton per tahun dapat diekspor melalui Kalimantan Barat. Diharapkan ekspor CPO langsung tersebut dapat mengamankan neraca perdagangan dan menjadi tambahan pendapatan daerah melalui bagian dari bea keluar CPO.

Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan pelayanan umum dan administrasi dengan kegiatan antara lain Memberikan bantuan pengujian komoditi ekspor bagi produsen yang akan melakukan ekspor maupun yang belum melakukan ekspor, Pengawasan dan Pengujian mutu barang ekspor untuk keperluan sertifikasi, Pengawasan dan Pengujian barang impor dan barang yang beredar, Memberikan layanan Kemetrolgian Legal yang mencakup pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan pelayanan Tera dan Tera Ulang peralatan UTTP. Pelayanan kepada masyarakat tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu UPSMB dan UP Kemetrolgian Pontianak dan Singkawang. Hingga akhir tahun 2012 telah berhasil dipertahankan Akreditasi laboratorium UPT di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 1 Laboratorium 5 ruang Lingkup (RL) yaitu Laboratorium. UP Kemetrolgian Pontianak; 1 Laboratorium Persiapan dengan pencapaian target 1 Laboratorium 5 RL yaitu UP kemetrolgian Singkawang; dan 1 Laboratorium Penilaian Akreditasi dan 1 Laboratorium Penambahan Akreditasi RL yaitu Laboratorium UPSMB Pontianak. Pada 2012, Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak dinyatakan sebagai UPTD terbaik kemetrolgian terbaik se Indonesia oleh Kementerian Perdagangan.

Peningkatan ruang lingkup dan akreditasi Laboratorium sehingga diakui secara global memerlukan Peralatan, SDM yang berkompetensi, dan anggaran operasional yang memadai. Sehingga investasi peralatan, peningkatan SDM dan biaya akreditasi dalam jangka menengah diperlukan untuk mempersiapkan laboratorium yang terakreditasi dan bersaing dengan laboratorium sejenis. Untuk itu maka perlu dilakukan pengkajian ulang pelayanan apa saja yang dapat dilakukan oleh UPSMB Pontianak. Karena bagaimanapun laboratorium UPSMB Pontianak telah cukup mempunyai peralatan, SDM yang terlatih dan ruang lingkup akreditasi (hanya perlu ditingkatkan agar lebih berdaya saing) serta dikenal dan dapat melakukan pengujian beberapa komoditi melalui penunjukan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Terlebih lagi daerah yang berdaya saing harus mempunyai laboratorium pengujian yang handal untuk komoditi-komoditi utamanya agar dapat bersaing di dunia.

Untuk 5 tahun kedepan sudah selayaknya Kalimantan Barat diarahkan menjadi daerah pusat industri baru nasional berbasis bahan baku lokal dan kuat strukturnya dan pusat perdagangan (distribusi) utama nasional di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I pada akhir RPJP 2028 dengan penekanan pada revitalisasi industri yang terstruktur kuat disertai dengan penguatan dan pengamanan perdagangan

Pemangku Kepentingan

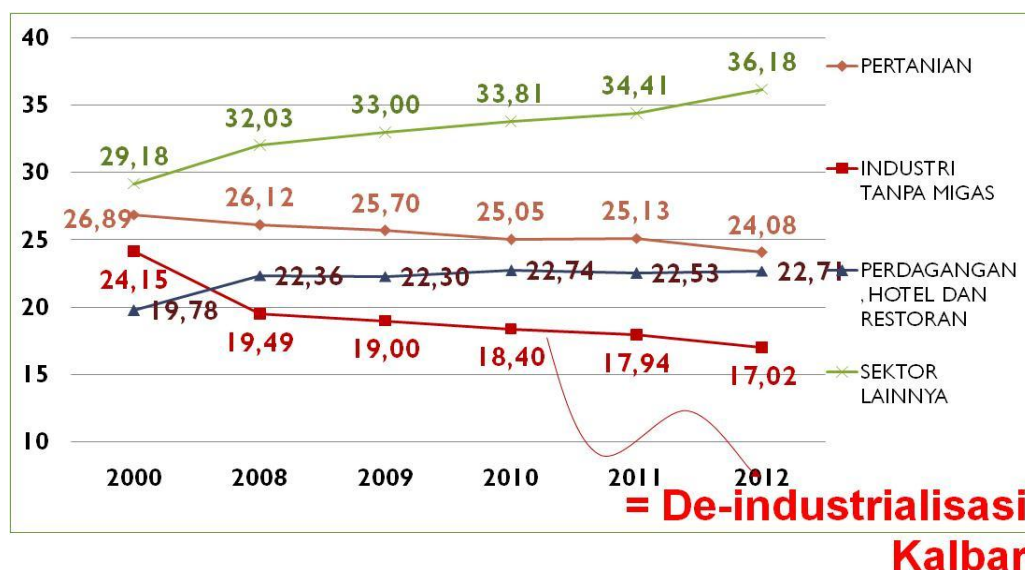
Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan Disperindag Provinsi Kalbar meliputi Dunia Usaha (Pelaku usaha industri dan perdagangan baik perorangan, kelompok maupun corporate beserta asosiasinya), Pemerintah (instansi pemerintah baik di pusat dan daerah provinsi serta Kab/kota terkait pengembangan sektor industri dan perdagangan), lembaga “ centre of excelent & innovation” dan “centre of transfereed – knowledge (lembaga litbang, perguruan Tinggi, sekolah kejuruan dan lembaga pelatihan kompetensi industri & perdagangan lainnya), Masyarakat dan lembaga lain yang dibentuk dan/atau diakui berdasarkan undang-undang.

Identifikasi Permasalahan

Potensi Sumber daya alam baik pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan Kalbar sangat tinggi dan diindikasikan menjadi *supplier* bagi Negara-negara tetangga dan China yang lebih menikmati nilai tambah karena terjadinya perlambatan pertumbuhan sektor industri Kalbar.

Sektor industri sampai dengan tahun 2012 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam satu dasawarsa terakhir peranannya mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan pertumbuhan setiap tahunnya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Kalbar. Pada tahun 2000 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 24,15 persen, namun pada tahun 2012 menurun menjadi 17,02 persen.

Tabel 3.1. Trend perkembangan kontribusi per sektor di Kalbar 2000 – 2012
(perlu REVITALISASI INDUSTRI agar sharenya kembali diatas 20% pada PDRB Kalbar)



Sumber BPS Prov. Kalbar 2013

Selain berakibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalbar, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditi-komoditi primer Kalbar yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil

pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi daya—ungkit terhadap perekonomian. Bagaimanapun kedepan daerah Kalbar harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien. Percepatan penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah.

Sektor perdagangan, disisi lain, semakin memberikan peranan yang penting dalam perekonomian daerah dengan menggeserkan peranan industri. Namun demikian secara umum perdagangan Kalbar masih dihadapkan berbagai masalah seperti Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh produk-produk hulu dengan dominasi beberapa komoditi seperti karet, bauksit dan hasil tambang lainnya serta kayu. Total nilai dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktuatif dan tergantung pada Negara tujuan ekspor tradisional seperti US, China, Korea, Jepang, dan Singapura. Dan permasalahan penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan ekse negatif terhadap perdagangan dalam negeri (merembesnya bahan pangan illegal dari negara tetangga ke Kalbar seperti gula) dan industri dalam negeri (merembesnya bokar ke negara tetangga).

Neraca perdagangan Kalbar tetap menunjukkan trend surplus yang semakin besar, dari US\$ 648,65 juta (2007) menjadi US\$ 1.685,78 juta (2011). , namun anjlok pada tahun 2012 menjadi US\$ 764,49 juta akibat menurunnya nilai ekspor karet Kalbar karena resesi di Eropa dan Amerika serta pembatasan ekspor bahan mentah tambang oleh Pemerintah.

Tabel 3.2. Perkembangan Neraca Perdagangan Kalimantan Barat 2007 s/d 2012

No.	Tahun	EKSPOR		IMPOR		Neraca Perdagangan	
		Nilai FOB (US\$ Juta)	Perkembangan (%)	Nilai CIF (US\$ Juta)	Perkembangan (%)	(US\$ Juta)	Perkembangan (%)
1	2007*	721,58		72,93		648,65	
2	2008	898,27	24,49	103,02	41,26	795,25	22,6
3	2009	509,86	-43,24	53,79	-47,79	456,07	-42,65
4	2010	922,05	80,84	153,83	185,98	768,22	68,44
5	2011	1.867,80	102,57	298,71	18,32	1.685,78	119,44
6	2012	1.303,86	-30,19	539,37	80,57	764,49	-54,65

Catatan:

- Nilai ekspor dicatat berdasarkan angka *free on board (f.o.b.)* dan dinyatakan dalam ribu USD.
- Nilai impor dicatat berdasarkan angka *cost, insurance, and freight (c.i.f.)* dan dinyatakan dalam ribu USD.

Sumber : BPS Kalbar, 2013

*)Direktorat Jendral Bea & Cukai, dlm. BI, 2012

Namun demikian, Nilai dan volume ekspor Kalbar masih fluktuatif tetapi menunjukkan trend kenaikan yang signifikan sejalan dengan kebutuhan dunia akan bahan baku baik perkebunan maupun pertambangan. Nilai Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh produk-produk hulu dengan dominasi beberapa komoditi (yaitu karet, bauksit dan hasil tambang lainnya, serta kayu olahan utamanya plywood). Minyak Kelapa sawit sebagai komoditi utama Kalbar selain Karet walaupun produksinya diperkirakan akan mencapai 1 juta ton CPO pada tahun 2011 (prod 2010 : 920 ribu ton CPO), namun nilai ekspornya rendah. (diekspor dan diolah di daerah lain).

Tabel 3.3
Ekspor Beberapa Golongan Barang (HS2 Dijit) Januari - Desember 2011 - 2012.

Golongan Barang (HS)	Nilai FOB (Juta US\$)				Volume Januari - Desember 2012 (Juta Kg)	% Perub Des thd Nov2012	% Perubahan Jan-Des 2012 thd 2011	% Peran thd Total Ekspor Des 2012
	Nov 2012	Des 2012	Jan - Des 2011	Jan - Des 2012				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1. Karet dan Barang dari Karet (HS40)	52,05	43,12	965,58	867,77	208,04	-17,17	-30,84	39,37
2. Biji, Kerak, dan Abu logam (HS26)	48,70	40,31	460,06	375,37	11.860,00	-17,22	-18,41	36,81
3. Kayu, Barang dari Kayu (HS44)	14,28	15,70	210,56	199,56	200,06	9,93	-5,23	14,34
4. Lemak & Minyak Hewan / Nabati (HS15)	1,19	4,18	22,83	13,88	10,94	250,37	-39,22	3,82
5. Berbagai produk kimia (HS38)	0,28	3,19	0,48	5,38	35,35	1138,23	1027,18	2,92
6. Tembakau (HS24)	1,48	0,82	0,70	3,03	0,28	-44,58	334,00	0,75
7. Ikan dan Udang (HS03)	0,92	0,54	9,54	9,15	1,41	-40,76	-4,03	0,50
8. Ampas / Sisa Industri Makanan (HS23)	0,93	0,50	6,16	7,99	73,43	-45,75	29,65	0,46
9. Biji-bijian berminyak (HS12)	0,15	0,33	2,11	2,46	2,76	112,69	16,50	0,30
10. Perabot, penerangan rumah (HS94)	0,38	0,25	2,71	2,75	1,00	-35,54	1,36	0,23
Total 10 Golongan Barang	120,35	108,95	1.680,71	1.287,34	12.393,28	-9,47	-23,41	98,73
Lainnya	0,48	0,56	187,09	16,53	66,83	15,81	-91,17	1,27
TOTAL EKSPOR	120,84	109,51	1.867,80	1.303,86	12.460,11	-9,37	-30,19	100,00

Sumber : BPS Kalbar, 2013

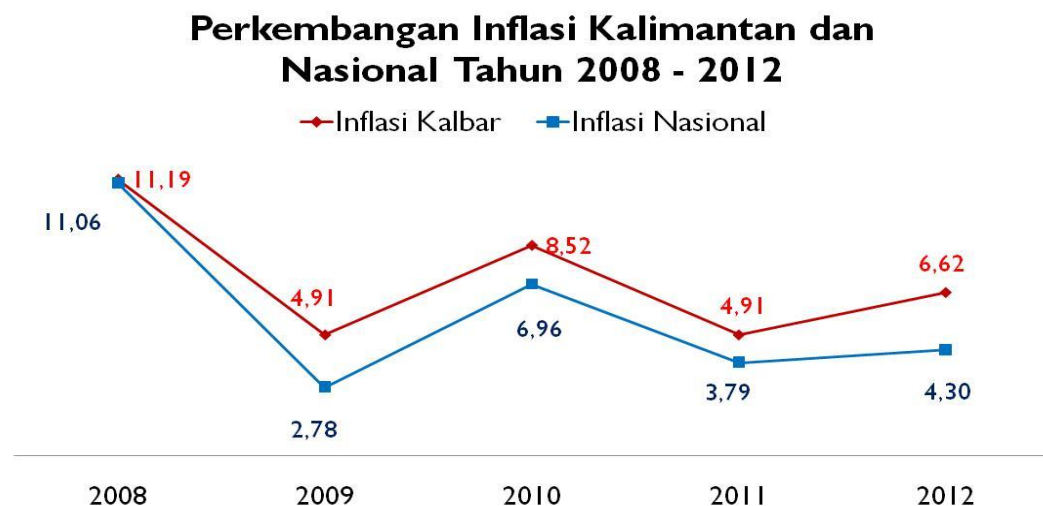
Sangat tergantung Karet dan Bahan tambang utamanya bauksit yg "distop" ekspor per 6 Mei 2012 (Permen ESDM 07/2012)

Perlu antisipasi penurunan kinerja ekspor dg meningkatkan ekspor komoditi lainnya = CPO

Sedangkan negara tujuan ekspor Kalbar hingga tahun 2012 masih didominasi oleh negara-negara ASIA (lk 90% nilai ekspor Kalbar) terutama RRC (termasuk Hongkong), Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN (regionalisasi bukan globalisasi). Pada tahun 2010 ekspor ke RRC mencapai 56% nilai ekspor Kalbar; sedangkan Jepang 11% ; Korea Selatan 6,17 % dan ASEAN 12,6 %. Yang perlu diperhatikan walau Negara-negara Asia termasuk China tidak terkena resesi dunia, namun karena barang yang diekspor dari Kalbar ke Negara tersebut berupa barang mentah dan hasil industri hulu, maka akan terimbas volume dan nilai ekspornya karena bahan baku dari Kalbar itu digunakan untuk produk-produk China yang di jual ke Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan

diperdagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi di dalam negeri masih rendah yang ditandai dengan margin distribusi perdagangan dalam negeri juga masih relative sangat berfluktuatif. Hal ini disebabkan karena tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) tingkatan akhir : Pasar, Pengumpul, Grosir dan Eceran masih lemah. Kondisi tersebut sangat rawan di Kalbar karena produk-produk konsumsi Kalbar utamanya berasal dari luar Kalbar bahkan negara tetangga dimana hanya sebagian kecil bahan kebutuhan pokok masyarakat yang tersedia dan berasal dari Kalbar seperti ikan, sebagian daging, unggas dan telur. Padahal sistim logistik Kalbar sangat tidak efisien karena pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang tidak layak/memadai. Akibatnya inflasi selalu tinggi (diatas nasional) dan pertumbuhan ekonomi dibawah pertumbuhan nasional selain dikarenakan tingginya biaya angkut udara.

Gambar. 3.1. Inflasi Kalbar dan Nasional 2008 - 2012



SUMBER : BPS Kalbar, 2009 - 2013

Pertumbuhan ekonomi rendah terjadi tidak hanya karena de-industrialisasi (penurunan peran sektor industri) tetapi juga karena permasalahan sistim logistik daerah yang masih tidak efisien. Sedangkan sektor lainnya (primer maupun tertier) belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi walaupun sudah dipercepat akselerasinya (pembukaan kebun dan areal tambang).

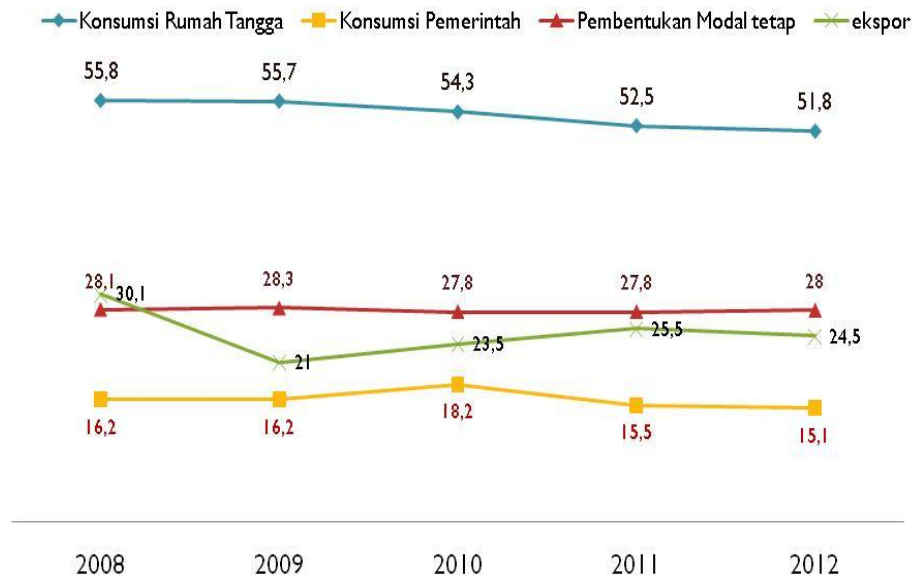
Pertumbuhan ekonomi Kalbar saat ini masih dibentuk utamanya oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berkisar antara 52 – 56 % dari PDRB Kalbar dan ekspor hanya berperan sebesar 22 – 31 % dalam kurun 2008 – 2012. Hal ini menunjukkan pasar Kalimantan Barat cukup besar dan jika dapat dimanfaatkan untuk penumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan barang dan jasa oleh pengusaha lokal terutama UMKM, maka akan sangat membantu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kalbar yang lebih berkualitas.

Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan sisi produksi baik itu untuk barang konsumsi sektor primer misalnya pertanian, juga untuk barang-barang industri (olahan).

Gambar 3.2. Struktur PDRB Kalbar Menurut Komponen Penggunaan

**KALBAR MASIH DITOPANG
 PERTUMBUHAN PDRB OLEH
 KONSUMSI RUMAH TANGGA**

Struktur PDRB Kalbar menurut Komponen Penggunaan 2008 - 2012



Sumber : BPS, 2009 - 2013

**→ POTENSI PASAR DOMESTIK (KONSUMSI RUMAH TANGGA) YG BESAR
 → TANPA PENGAMANAN PASAR LOKAL, MAKA AKAN DISERBU OLEH PRODUK DARI LUAR !!**

Masyarakat Ekonomi Asean / Asean economic Community (MEA/AEC 2015). Secara bertahap ASEAN yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja memastikan diri masuk dalam babak baru percaturan geoekonomi dan geopolitik global. Salah satu keputusan strategis tersebut yaitu pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand Desember 2009, semua negara-negara ASEAN telah meratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan sepakat Piagam ASEAN memasuki tahap *entry to force*, sehingga tiga pilar ASEAN Community yang meliputi **ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community** akan segera diimplementasikan dan ditargetkan terintegrasi penuh pada tahun 2015², Pembentukan ASEAN Community tersebut bertujuan untuk

² yang semula ditargetkan pada tahun 2020 sesuai hasil KTT Asean 1997, namun dipercepat implementasinya menjadi tahun 2015 sesuai hasil KTT di Cebu pada tahun 2007, dan pada akhirnya

meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN sehingga mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan global. Beberapa isu terpenting dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN, antara lain kesiapan dunia usaha baik daerah dan nasional untuk menghadapi persaingan dengan ASEAN baik di dalam negeri maupun di pasar ASEAN, serta kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menyambut MEA 2015. *Namun hal mendasar yang harus mendapatkan perhatian semua pemangku kepentingan di daerah dan nasional, khususnya dunia usaha, adalah pentingnya perubahan cara pandang dalam menyikapi persaingan yang timbul dari AEC 2015. Persaingan dari luar tidak lagi dianggap sebagai ancaman, namun sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Karena kunci kemenangan dalam pasar bebas adalah daya saing.* Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan daya saing bagi produk barang dan jasa Indonesia. Hal itu dilakukan antara lain untuk menjamin perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual, memberikan perlindungan konsumen, meningkatkan arus investasi sektor infrastruktur, dan menyempurnakan kebijakan insentif dan disinsentif yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha yang berdaya saing utamanya sektor industri dan perdagangan. Sekaligus juga melakukan upaya-upaya menggalakan penggunaan produk dalam negeri.

Instrumen gerakan Aku Cinta Produk Indonesia (100% Indonesia) dapat dikembangkan menjadi Gerakan Aku Cinta Produk Kalbar dan Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk pengamanan perdagangan dalam menghadapi implementasi MEA 2015 sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dilihat dari PDRB Penggunaan Kalbar dalam 5 (lima) tahun terakhir (2008-2012) komponen yang dominan adalah Konsumsi Rumah Tangga dimana rata-rata pada kurun waktu tersebut mencapai diatas 52 %, dan merupakan potensi basis pasar pengembangan daya saing industri dan perdagangan daerah.

Perlindungan Konsumen, Namun demikian Di sisi lain perlindungan konsumen Kalimantan Barat masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Pengamat Tera (Metrologi) dan keterbatasan pelayanan metrologi legal dimana saat ini Pelayanan Kemetrolgian di Kalimantan Barat masih dilayani oleh UPT Kemetrolgian Dinas Perindag Prov. Kalbar.

pada tahun 2013 berdasarkan hasil evaluasi bersama negara-negara Asean diundur pelaksanaan menjadi 1 Januari 2016.

Visi Pembangunan Kalimantan Barat 2013 – 2018 adalah :

***“Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat,
Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”***

Fokus bidang Industri dan Perdagangan adalah Sejahtera. Sejahtera merupakan keadaan utuh sebagai kesimpulan atau akumulasi dari visi beriman, sehat, cerdas, aman, dan berbudaya. Masyarakat dan individu yang sejahtera adalah masyarakat yang aman sentosa, selamat, adil dan makmur. Pendekatan untuk mencapai visi sejahtera adalah pendekatan menyeluruh, konsisten, dan kebersamaan, sebab hanya dengan kebersamaan kita bisa memenangkan setiap upaya, sasaran, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan

Dari Visi daerah 2013-2018 ditetapkan 10 (sepuluh) misi : dan yang terkait Industri dan Perdagangan adalah misi ke 8 (delapan)

***“Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan,
melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha
kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi
dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan
melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus
mempertahankan ketahanan budaya. (focus bidang indag)”***

Dari misi kedelapan diatas, tujuan yang menjadi acuan Dinas Perindag Provinsi Kalbar dalam menyusun Renstra ini adalah tujuan (5) yaitu Meningkatkan daya saing Daerah. Dengan sasaran Meningkatnya ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi dan pengamanan perdagangan; serta tujuan (6) yaitu Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi dengan sasaran Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal.

Pendekatan 3 Klaster Program Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

- 1) Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri dengan target kinerja
 - Persentase konsumsi rumah tangga nasional dipasok dari produksi dalam negeri sebesar 95 %
 - Stabilisasi harga bahan pangan utama dengan indikator rata-rata koefisien variasi 10 komoditi pangan utama sebesar 6
 - Kontribusi sektor perdagangan meningkat dengan indikator Pertumbuhan PDB riil tahunan pedagang besar dan eceran minimum 8%

- 2) Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Perdagangan Internasional, dengan target kinerja
 - Pertumbuhan Ekspor Nonmigas tahun 2013 sebesar 13,5 - 14,5%
 - Target nilai ekspor minimal sama dengan tahun 2012
 - Total ekspor Indonesia ke negara non tradisional meningkat 12% tahun 2012
 - Share ekspor Indonesia ke negara non tradisional meningkat menjadi 56% tahun 2013
- 3) Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*, dengan target kinerja
 - Terwujudnya Kemendag yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, indikatornya adalah indeks persepsi korupsi (Program Inisiatif Anti Korupsi dan Survey Integritas) min. 5 besar
 - Terwujudnya laporan keuangan kemendag sesuai dengan SAP targetnya WTP
 - Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Kemendag, indikatornya adalah efektifitas dan akuntabel (LAKIP) minimal B dan WTA

Sedangkan pendekatan tujuan dan sasaran Kementerian Perindustrian RI hingga berakhirnya RPJMN 2010-2014 adalah ***focus upaya hilirisasi industri berbasis agro a.l. Sawit dan Karet, hilirisasi industri berbasis bahan tambang, Pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa, Pengembangan industriomotif dan upaya-upaya penyebaran Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar pulau Jawa***

Selanjutnya dalam perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional dan global ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan a.l.

1. Fokus pengembangan industri berdasarkan Perpres No. 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan , dengan strategi pengembangan seperti yang diuraikan dalam Perpres tersebut yaitu:
 - Dalam Kebijakan tersebut, Karet dan Kelapa Sawit ditetapkan sebagai Komoditi Unggulan Daerah Kalimantan Barat. Pengembangan Industri pengolah berbasis kedua komoditi tersebut menjadi prioritas nasional. (pendekatan Bottom-Up) dan peta jalan telah ditetapkan oleh Permenperind 134/2010
 - Pengembangan Kompetensi inti Industri (KIID)kab/kota (bottom-Up)
 - Pengembangan Klaster keramik dan kelapa terpadu (pendekatan Top-Down)
 - Pengembangan klaster industri pengolahan hasil laut dan perikanan
 - Pengembangan industri Kab/kota melalui pendekatan / model OVOP (one village one product) dan
2. Pengembangan Industri turunan bauksit sesuai Perpres no. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI 2011-2025)

3. Pengembangan Industri pendukung terutama untuk pengangkutan air (industri perkapalan) dan alat mesin pertanian (ALSINTAN CENTRE) di Kalimantan Barat
4. Pengembangan IKM kreatif yang berbasis agro, fashion, keramik dan IT
5. Mendorong penumbuhan dan pengembangan kawasan industri di kabupaten / kota sesuai amanat PP No 24 Tahun 2009 serta industri berbasis kawasan
6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap IKM serta penumbuhan kewirausahaan baru
7. Peningkatan standar mutu kemasan produk IKM
8. Promosi produk IKM melalui Pameran-pameran tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
9. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri
10. Gerakan nasional Aku Cinta Indonesia (Indonesia 100%) dan konsumen cerdas (Koncer) yang akan memacu rasa percaya diri bangsa untuk berkarya serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri dengan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.
11. Peningkatan perlindungan konsumen dalam negeri, pelayanan kemetrollogian serta pengamanan pasar domestic
12. Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan meminimalisir disparitas harga antar daerah (kab/kota) di Kalbar. termasuk pengembangan sarana dan prasarana distribusi (pasar lelang, resi gudang, pasar tradisional dll) sesuai cetak biru sistim logistic nasional
13. Penerapan sistim peringatan dini (EWS) untuk bahan pokok dan penting Antisipasi ketersediaan dan fluktuasi harga sembako & barang penting
14. Berlangsung perundingan revisi Border Trade agreement (BTA) 1970
15. Upaya nasional dalam Pengembangan ekspor ke Negara non tradisional
16. Kesiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015
17. Mensinergikan program dan kegiatan antara pemerintah-dunia usaha-litbang / Perguruan Tinggi serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (prov dan kab/kota) dalam konteks pengembangan Sistim Inovasi nasional dan daerah

Telahaan RTRW dan KLHS

Dari sisi penataan ruang dan KLHS, Kalimantan Barat dalam 20 tahun kedepan sesuai rancangan Revisi RTRW Kalbar 2011-2031 perlu diperhatikan dinamika internal dan eksternal spatial daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan aktivitas ekonomi terutama industri dan perdagangan a.l.

- Sistem Perkotaan : Adanya pemekaran wilayah (Kab. Kubu Raya dan Kab. Kayong Utara th.2007) yang menjadi titik tumbuh baru yang berdampak pada sistem wilayah; Indikasi terbentuknya Kawasan Metropolitan Pontianak (KMP) dalam 20 thn mendatang (penduduk > 1 jt jiwa); dan usulan beberapa ibukota kabupaten menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), yakni: Kota Bengkayang, Kota Ngabang, Kota Sekadau, Kota Nanga Pinoh, Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang, dan Kawasan Perkotaan Sukadana-Telok Melano

- **Struktur Ruang** ; adanya Usulan kab/kota untuk membangun infrastruktur baru, khususnya bandara dan pelabuhan yang perlu disinkronisasi dengan RTRWN dan Kementerian terkait; Rencana pembangunan Jalan Trans Kalimantan (Lintas Utara, Lintas Tengah, dan Lintas Selatan); Lintas Utara menghubungkan 5 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang diindikasikan melintasi Kawasan *Heart of Borneo (HoB)*; dan Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik, a.l: air, uap, *micro hydro*, nuklir (tahap penelitian).
- **Pola Ruang** : **adanya** keberadaan kawasan permukiman (desa/kampung) dalam kawasan hutan/lindung; terdapat sekitar 18,2 % luas Kalbar menjadi bagian dari *Heart of Borneo*; adanya Kebijakan pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, KAPET Khatulistiwa, Koridor Ekonomi Nasional, Kawasan Terpadu Mandiri (KTM), Kawasan Minapolitan, Kawasan Usaha Agrobisnis Terpadu (KUAT), dan kawasan strategis lainnya; Keberadaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (belum diakomodasi dalam Perda No.5 Th. 2004 ttg RTRWP Kalbar); Pengembangan kawasan pertambangan (PP No. 22/2010 ttg Wilayah Pertambangan); Berkurangnya lahan pertanian (UU 41/2009 ttg perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan); serta Ancaman bencana alam: abrasi, banjir (rob, bandang, longsor), kebakaran hutan dan lahan gambut

Selanjutnya secara eksplisit mempunyai tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang aman, produktif, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan melalui pengembangan wilayah yang berbasis pada agrobisnis, industri, dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara. Disini dinyatakan secara eksplisit bahwa salah satu core bussines Kalbar 20 tahun kedepan adalah industri dan secara implicit Kalbar diarahkan menjadi pusat distribusi/logistic nasional yang dapat diperhitungkan kedepan.

Selanjutnya jika ditinjau dari struktur ruang, terdapat rencana pusat-pusat kegiatan yang perlu diperkuat dengan sarana dan prasarana logistik termasuk pasar, yaitu

a. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yaitu Kawasan Metropolitan Pontianak;

b. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) meliputi:

1. Kota Sambas (ibukota Kabupaten Sambas);
2. Kota Singkawang;
3. Kota Mempawah (ibukota Kabupaten Pontianak);
4. Kota Entikong (Kabupaten Sanggau);
5. Kota Sanggau (ibukota Kabupaten Sanggau);
6. Kota Sintang (ibukota Kabupaten Sintang);
7. Kota Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu); dan
8. Kota Ketapang (ibukota Kabupaten Ketapang);

- c. PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) meliputi:
 1. Kota Temajuk (Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas);
 2. Kota Aruk (Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas);
 3. Kota Jagoi Babang (Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang);
 4. Kota Entikong (Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau);
 5. Kota Jasa (Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang); dan
 6. Kota Nanga Badau (Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu);
- d. PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) meliputi:
 1. Kota Bengkayang (ibukota Kabupaten Bengkayang);
 2. Kota Ngabang (ibukota Kabupaten Landak);
 3. Kota Sekadau (ibukota Kabupaten Sekadau);
 4. Kota Nanga Pinoh (ibukota Kabupaten Melawi); dan
 5. Kawasan Perkotaan Sukadana-Teluk Melano (Kabupaten Kayong Utara); serta
- e. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) meliputi:
 1. Kota Liku, Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat, dan Selakau (Kabupaten Sambas);
 2. Kota Seluas, Ledo, Samalantan, dan Sungai Duri (Kabupaten Bengkayang);
 3. Kota Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, dan Anjongan (Kabupaten Pontianak);
 4. Kota Karang, Pahauman, dan Darit (Kabupaten Landak);
 5. Kota Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu, dan Batu Ampar (Kabupaten Kubu Raya);
 6. Kota Teluk Batang (Kabupaten Kayong Utara);
 7. Kota Kendawangan, Manismata, Tumbang Titi, Sandai, dan Balai Berkuak (Kabupaten Ketapang);
 8. Kota Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karang, dan Pusat Damai (Kabupaten Sanggau);
 9. Kota Sungai Ayak dan Nanga Taman (Kabupaten Sekadau);
 10. Kota Baru dan Nanga Ella (Kabupaten Melawi);
 11. Kota Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, dan Nanga Merakai (Kabupaten Sintang); dan
 12. Kota Semitau dan Nanga Tepuai (Kabupaten Kapuas Hulu).

Sedangkan untuk pengembangan industri diarahkan di kawasan peruntukan industri yang akan ditetapkan oleh Kabupaten/kota melalui RTRW Kab/kota dan untuk pengembangan Kawasan Industri diarahkan pada daerah-daerah yang mempunyai akses kepada jalan arteri primer dimana berdasarkan Rancangan Revisi RTRW Kalbar meliputi :

1. Jalan Bebas Hambatan Tayan – Pontianak – Sungai Pinyuh (eksisting);
2. Sungai Pinyuh – Mempawah – Sungai Duri - Singkawang – Pemangkat – Tebas – Sambas (rencana);
3. Pontianak – Tayan – Sosok – Tanjung – Kembayan – Balai Karang – Entikong – Batas Serawak (eksisting);

4. Tanjung – Sanggau – Sekadau – Tebelian – Sintang – Putussibau – Batas Kalimantan Timur (rencana);
5. Tayan – Balai Berkuak – Aur Kuning – Sandai – Nanga Tayap – Batas Kalimantan Tengah (eksisting);
6. Simpang Dua – Teluk Melano – Teluk Batang (rencana);
7. Nanga Tayap – Tumbang Titi – Pelang – Ketapang (rencana); dan
8. Pelang – Kendawangan (rencana);

Pengembangan industri dan Perdagangan secara pola ruang diarahkan pada kawasan-strategis nasional dan provinsi yang mempunyai nilai strategis dalam bidang ekonomi, dimana untuk Kawasan Strategis Nasional telah ditetapkan KSN Kapet, sedangkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata;
- b. Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri;
- c. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
- d. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
- e. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan;
- f. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan;
- g. kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Pontianak dengan sektor unggulan pertambangan;
- h. kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan;
- i. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan;
- j. kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan
- k. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Pengembangan industri juga diarahkan pada kawasan budidaya untuk peruntukan industri yaitu :

- a. kawasan industri berada di Semparuk, Singkawang, Sungai Raya Kepulauan, Sungai Kunyit, Mandor, Pontianak, Tayan, Teluk Batang, Ketapang, Kendawangan, dan Sintang; dan
- b. kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api

***Penentuan
Isu-isu
Strategis***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka isu strategis bidang industri dan perdagangan Kalbar adalah :

1. DE-INDUSTRIALISASI dan struktur industri yang lemah disertai peluang Revitalisasi Industri basis SDA a.l. Bauksit, Sawit, Karet, Kayu & Perikanan beserta industri pendukungnya a.l. industri alat mesin pertanian (alsintan) dan angkutan serta pengembangan IKM daerah yang berdaya saing
2. Kenaikan harga BBM & SISTEM LOGISTIK DAERAH yang tidak efisien a.l. Sarana Distribusi (Pelabuhan, Jalan, Gudang, Pasar, Dan Sistem Perdagangan (Pasar Lelang & Resi Gudang Belum Optimal) yang mengakibatkan rentan terhadap gejolak inflasi dan fluktuasi ketersediaan stok dan harga
3. PERLINDUNGAN KONSUMEN dan pengamanan perdagangan daerah terutama dengan semakin terbukanya produk-produk impor masuk baik secara legal dan illegal
4. STRUKTUR EKSPOR KALBAR YANG LEMAH yang di Dominasi Industri Hulu Karet dan Kayu Serta Raw Material Barang Tambang
5. PENGEMBANGAN INDAG / AKTIVITAS EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN dan Kawasan – kawasan cepat tumbuh terutama dengan semakin terbukanya daerah perbatasan dan daerah, baik di pedalaman maupun pesisir, dengan potensi ekonomi tinggi yang cepat tumbuh dan menjadi pusat pertumbuhan baru.

Visi, Misi, Moto dan Nilai Dasar

Visi

“Terwujudnya Industri Yang Maju Dan Perdagangan Yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Barat”

- Industri yang maju mengandung makna bahwa pembangunan industri di Kalbar maju pada pengolahan hasil sumber-sumber daya utama daerah, seimbang dalam struktur (industri besar-menengah-kecil dan antara hulu-hilir), dan dipersiapkan untuk tidak tersebar tetapi pemusatan lokasi industri untuk kemudahan penyediaan infrastruktur & pengendalian lingkungan. Industri maju juga berarti maju dalam penyerapan tenaga kerja dan berbasis inovasi yang terus menerus.
- Perdagangan yang tangguh mengandung makna bahwa perdagangan di Kalbar diarahkan pada sistem dan distribusi perdagangan yang sehat dan efisien baik kedalam maupun keluar Kalbar bagi para pelaku perdagangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen di Kalbar (dari gejolak kelangkaan stok utamanya bahan pokok & strategis serta keamanan konsumen) sehingga mampu menciptakan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan berketahanan yang tinggi yang pada akhirnya mampu berperan didalam perdagangan regional maupun internasional.
- Guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor perindustrian dan perdagangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat berupa sumbangan PDRB sektor industri dan perdagangan yang tinggi dan tidak hanya dinikmati oleh Usaha Menengah – Besar tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah sehingga dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Misi

1. Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perindustrian daerah Kalimantan Barat
2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat.

Moto

Industri Maju dan Perdagangan Tangguh untuk pertumbuhan, pemerataan dan kesejahteraan Kalbar

Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya Dinas Perindag menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

<i>Kreatif - Inovatif</i>	Kami menjunjung tinggi ide-ide kreatif-inovatif dalam upaya mencari terobosan agar dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan Kalbar berdasarkan tupoksi dan kewenangan yang ada, tidak terjebak dalam kondisi, perilaku, pola pikir dan upaya-upaya yang bersifat “bussines as usual”. Dengan keterbatasan yang ada baik dilingkungan eksternal dan internal termasuk keterbatasan kewenangan, individu maupun organisasi kami harus mampu mencari terobosan-terobosan yang Kreatif-inovatif
<i>Sustainable</i>	Kami membangun prinsip, nilai dan keputusan dalam melaksanakan tupoksi berdasarkan kewenangan berazaskan pada keberlanjutan/ sustainable baik berupa pengembangan sektor industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maupun pembangunan perdagangan kearah Sustainable trade.
<i>Fairness</i>	Kami membangun nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di Kalbar. Berkeadilan tidak berarti perlakuan sama, melainkan perlakuan agar baik yang kecil maupun yang besar bersama-sama dapat berkembang dengan baik, berkompetisi sekaligus bekerjasama dan tidak saling menjatuhkan diantaranya.
<i>Profesionalisme</i>	Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip bekerja dengan selalu meningkatkan kompetensi diri dan organisasi, kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Tujuan & Sasaran Strategis (Jangka Menengah)

Melalui pelaksanaan misinya, Dinas Perindag Provinsi Kalbar berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
1	Revitalisasi dan penguatan struktur industri Kalbar	1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalimantan Barat
		2	Tumbuh dan berkembangnya IKM Kalimantan Barat
2	Meningkatkan stabilitasi dan penguatan pasar lokal yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri	3	meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah
3	Meningkatkan perdagangan luar negeri daerah yang berkualitas	4	meningkatkan ekspor daerah dan terkendalinya impor
4	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang baik dan profesional	5	Meningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi

Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, Dinas Perindag Provinsi Kalbar menetapkan lima sasaran strategis sebagai berikut:

Tumbuh dan berkembang sektor industri (SS 1)

Industri Kalbar sebagai sektor penggerak utama peningkatan nilai tambah harus tumbuh dan berkembang untuk kontribusi perekonomian daerah dan menghindari **“potential lost”** produk-produk primer yang dihasilkan Kalbar dan diarahkan untuk tumbuh & berkembang dengan basis pengolahan sumberdaya utama Kalbar terutama (pertambangan dan pertanian dalam arti luas) dan industri kreatifitas basis IT & seni budaya luhur daerah yang unik yang berkelanjutan.

Tumbuh dan berkembang sektor industri selain peningkat nilai tambah komoditi primer utama Kalbar, juga diharapkan tumbuh dan berkembang industri pendukung penggerak utama perekonomian daerah (pertambangan, pertanian dan perkebunan) terutama industri galangan kapal dan alat mesin pertanian (alsintan). Pengembangan industri galangan kapal diharapkan dapat menunjang perkapalan sebagai alat distribusi logistik dan produk dari dan ke sentra produksi, sehingga galangan kapal yang maju dapat mendorong efisiensi distribusi komoditi utama daerah. Sedangkan pengembangan alsintan di Kalbar sangat diperlukan terutama dalam menunjang ketahanan pangan dan menjadikan Kalbar sebagai lumbung pangan dan energi di Pulau Kalimantan dan nasional. Fokus utama sampai dengan 2013 adalah penguatan dan pengembangan alsintan centre yang merupakan pilot project alsintan centre nasional di luar pulau Jawa.

Tumbuh dan berkembang industri Kecil dan Menengah (SS2)

Industri Kecil dan menengah (IKM) harus dipekuat tumbuh dan berkembangnya, karena IKM dapat menjadi penyerap tenaga kerja, modernisasi masyarakat utamanya pedesaan, peningkatan pendapatan masyarakat, pemenuh kebutuhan masyarakat dan yang terpenting sebagai upaya memperkuat struktur industri Kalbar yang secara pendapatan masih dipegang industri sedang besar hingga 81,5% dari total pendapatan dan aset sebesar 79 % dari aset total sektor industri Kalbar walaupun populasi industri besar/sedang hanya 0,5% total populasi industri Kalbar (Sensus Ekonomi 2006, BPS Kalbar). Fasilitasi pengembangan penyebaran dan penguatan daya saing IKM daerah menjadi sasaran yang sangat penting dan krusial. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru IKM hingga di pedesaan serta peningkatan kemampuan SDM, peralatan, permodalan dan penerapan standarisasi IKM daerah akan menjadi perhatian utama. Dan peran UPTD pelatihan bagi Industri Kecil dan Menengah akan menjadi sangat penting dan krusial dalam meningkatkan kompetensi SDM IKM daerah.

Meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah (SS3)

Sistem distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien akan nyata berpengaruh, pertama, terhadap daya saing produk-produk Kalbar dari sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran didalam maupun diluar daerah, dan kedua, terhadap ketersediaan stok bahan pokok dan strategis daerah, dimana Kalbar sebagaimana daerah diluar pulau Jawa lainnya masih dihadapkan pada sistim logistik yang sangat tidak handal penyebab ekonomi biaya tinggi akibat keterbatasan Supra dan infrastruktur logistik daerah. Untuk itu upaya-upaya untuk pengendalian inflasi, perluasan akses pasar produk Kalbar baik produk industri maupun non industri dan pengembangan sarana perdagangan menjadi sangat krusial.

Selain itu, Sistim distribusi yang efisien tidak akan menjadikan Kalbar menjadi daerah perdagangan yang tangguh jika tidak disertai dengan perlindungan bagi konsumen terhadap kepastian dan keamanan barang yang dibeli, terlebih lagi dengan banjirnya produk-produk negara luar terutama China dan Malaysia. Untuk itu perlu penguatan upaya-upaya perlindungan tidak hanya terhadap konsumen Kalbar tetapi juga para pelaku usahanya. Peran operasional pelayanan Kemetrolagian yang didukung kemampuan personil dan laboratorium yang baik serta pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten/kota akan menjadi alat krusial dalam Pengamanan perdagangan. Untuk lima tahun kedepan ini UPTD pelayanan kemetrolagian tersebut perlu dipertahankan dan diperluas akreditasi ruang lingkup laboratoriumnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada dunia usaha. UP Kemetrolagian harus dapat menjadi ujung tombak tertib ukur di Kalbar.

Pengamanan Perdagangan juga dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan ekonomi lokal, karena saat ini dengan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB penggunaan

Kalbar dalam 5 (tahun) terakhir (2008 – 2012) masih selalu diatas 52 % PDRB Total Kalbar. Sehingga tindakan pengamanan perdagangan di sinergikan dengan gerakan aku cinta produk lokal dan gerakan konsumen cerdas akan memicu potensi ekonomi lokal pesat berkembang, karena yang dikonsumsi adalah produksi lokal dengan nilai tambah ada di lokal.

Meningkatnya Ekspor daerah dan terkendalinya impor (SS4)

Ekspor dan impor merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB Kalbar, dan daerah yang maju adalah daerah yang mampu mengekspor produk dan jasa yang dihasilkannya. Ekspor Kalbar walaupun secara nilai menunjukkan trend peningkatan, namun jika diteliti ternyata peningkatan tersebut dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil ekspor barang mentah hasil tambang. Yang perlu diwaspadai pada tahun 2014, bahan baku tambang seperti bauksit akan dilarang untuk diekspor kecuali dalam bentuk setengah jadi atau jadi (UU Nomor 4/2009 tentang Mineral dan batubara). Hal ini dapat menyebabkan turun secara drastis nilai ekspor Kalbar untuk tahun tersebut. Oleh sebab itu promosi produk-produk daerah di dalam dan di luar negeri dan ekspor komoditi-komoditi perkebunan seperti CPO dan Karet perlu ditingkatkan ekspornya untuk menggantikan peranan bauksit, terlebih CPO pada kenyataannya walaupun besar diproduksi di Kalbar namun tidak diekspor melalui Kalbar melainkan melalui pelabuhan lain di luar Kalbar.

Pengendalian impor perlu dilakukan untuk menjaga masuknya barang-barang konsumsi yang tidak layak dan berbahaya bagi konsumen, juga kaitannya dengan pengamanan produk-produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya produk serupa dari luar negeri yang masal dan kualitasnya tidak dapat dijamin.

Pembinaan perdagangan lintas batas menjadi salah satu fokus lokasi pengembangan ekspor dan pengendalian impor, karena di daerah ini berbagai masalah berkaitan dengan perdagangan illegal sering muncul. Pengendalian impor dapat dilakukan melalui instrumen penerbitan angka pengenal impor (API) dan pemantauan masuknya barang impor dan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk selanjutnya menjadi bahan masukan bagi kebijakan pusat.

Pengembangan ekspor dan pengendalian impor di Kalbar juga harus didukung dengan institusi daerah yang memberikan pelayanan kepada dunia usaha terhadap pemberlakuan standardisasi dunia. Untuk itu UPTD pengawasan dan sertifikasi mutu barang perlu ditingkatkan kemampuan personil dan kemampuan laboratoriumnya terutama yang melayani Uji standarisasi Komoditi ekspor dan kalibrasi alat-alat laboratorium. Selanjutnya UPTD ini dengan ketersediaan Sumber daya dan kemampuan pengujiannya (ruang lingkup yang telah terakreditasi) saat ini juga perlu untuk dikaji peningkatan peranannya seiring dengan diterbitkannya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membatasi daerah dalam menerima retribusi dan implementasi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, sehingga laboratorium pengujian yang telah didirikan dan dibiayai oleh pemerintah daerah Kalbar ini dapat membantu peningkatan daya saing dunia usaha untuk

mengembangkan nilai dan pasar ekspornya dan mengawasi barang-barang impor agar sesuai dengan Standar yang berlaku dan aman bagi masyarakat.

Meningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi (SS5)

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi adalah suatu hal yang wajib untuk mendukung pencapaian sasaran strategis lainnya. Peningkatan SDM personil, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja yang layak, perencanaan yang handal yang didukung ketersediaan data dan informasi yang akurat dan reliable, serta pengelolaan administrasi perkantoran yang tertib dan akuntabel menjadi hal pokok yang harus dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai SKPD yang bersinggungan langsung dan tidak langsung dengan dunia usaha dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting Disperindag. Oleh sebab itu, pembinaan kemampuan kompetensi dan disiplin pegawai Dinas menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil kinerja yang optimal. Disperindag Provinsi Kalimantan Barat bersama UPTD dibawahnya yang langsung bergerak pada pelayanan dunia usaha dan masyarakat harus didukung dengan peningkatan kompetensi aparatur yang profesional dan responsif terhadap dinamika di dunia usaha dan masyarakat serta dinamika lokal, nasional hingga global. Selain itu, Dinas Perindag provinsi Kalbar perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, agar merangsang upaya terbaik dari pegawai di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai. Tidak saja sistem manajemen kepegawaian yang baik, tersedianya standar operasional pelayanan yang baku, fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja juga perlu disediakan termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Disperindag Provinsi Kalbar

Hal lain yang tidak kalah penting adalah Perencanaan. Perencanaan kerja yang baik akan sangat membantu kejelasan dan pencapaian kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD. Perencanaan kerja juga merupakan sarana bagi SKPD untuk belajar dan berkembang. Demikian pula Pengelolaan keuangan Negara, dimana pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Perencanaan kerja dan pengelolaan administrasi perkantoran juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga lebih tepat dan berdaya guna. Akhirnya, untuk melakukan manajemen organisasi yang baik SKPD juga harus mempunyai data basis terkait tupoksi dalam bentuk data statistic dan dalam konteks keruangan (spatial) sejalan dengan amanat pembentukan Jaringan Data Spatial (JDSP) di daerah

Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran strategis (jangka menengah) diatas, maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tumbuh dan berkembang sektor industri (SS 1)

STRATEGI	KEBIJAKAN
Revitalisasi Industri melalui peluang hilirisasi komoditi primer utama, Penguatan struktur industri, berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan	Mendorong penumbuhkembangkan industri yang memberikan nilai tambah komoditi utama potensi daerah melalui pendekatan kewilayahan, kawasan dan memperkuat industri agro yang sudah ada secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Mendorong penumbuhkembangkan industri yang mendukung pelaksanaan MP3EI di Kalbar dan industri peralatan pendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri di Kalbar

Tumbuh dan berkembang industri Kecil dan Menengah (SS2)

STRATEGI	KEBIJAKAN
Penumbuhkembangan IKM berbasis bahan baku lokal, kreatifitas dan Teknologi Informasi yang berdaya saing baik untuk pasar di dalam dan luar daerah	Mendorong dan menumbuhkembangkan IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial, promosi IKM serta penyediaan informasi pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya cultural/budaya setempat dan atau Teknologi Informasi, serta penyediaan tempat konsultasi teknis dan bisnis

Meningkatnya efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah (SS3)

STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kelancaran distribusi barang pokok dan barang strategis, penggunaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan daerah, serta mengembangkan perdagangan dan sistim perdagangan yang tertib, efisien, transparan dan berdaya saing	Memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha, mendorong berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, mendorong integrasi aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau

Meningkatnya Ekspor daerah dan terkendalinya impor (SS4)

STRATEGI	KEBIJAKAN
Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya-upaya mengendalikan impor	Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkualitas dan berdaya saing ditunjang pemantauan dan pengawasan atas impor daerah

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi (SS5)

STRATEGI	KEBIJAKAN
Membangun jejaring sinergitas pembangunan Indag baik di pusat dan daerah yang didukung tersedianya data, SDM, sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi pengembangan indag dengan instansi terkait baik di Pusat dan daerah untuk sinkronisasi dan sinergisitas dengan didukung data potensi berbasis kewilayahan (spatial) yang handal, didukung penguatan SDM aparatur serta peningkatan kualitas kinerja pelayanan internal dan eksternal yang berkelanjutan

5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka Rencana Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

KEBIJAKAN	PROGRAM
Mendorong penumbuhkembangkan industri yang memberikan nilai tambah komoditi utama potensi daerah melalui pendekatan kewilayahan, kawasan dan memperkuat industri agro yang sudah ada secara berkelanjutan dan berdaya saing	Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH); dengan kegiatan utama : Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri, Dukungan Penumbuhan dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kabupaten/Kota, Pengembangan & Implementasi Rencana Aksi komoditi Unggulan Provinsi Karet dan Sawit (Perpres 28/2008 dan Permenperindustrian 134/2010 tentang Peta Jalan industri Unggulan Provinsi Kalbar), Pemutakhiran data IKAHH, Implementasi dan monev Rencana Aksi Daerah Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Industri, Pengembangan Industri komoditi prioritas Provinsi (Kakao, perikanan, kelapa dan keramik), Promosi Industri Kimia agro dan Hasil Hutan, Pembinaan Iklim Usaha industri kimia agro dan hasil hutan

KEBIJAKAN	PROGRAM
Mendorong penumbuhkembangkan industri yang mendukung pelaksanaan MP3EI di Kalbar dan industri peralatan pendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri di Kalbar	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA); dengan kegiatan utama : Dukungan Pengembangan Alsintan Centre, Pembinaan Iklim Usaha Industri logam mesin elektronika dan aneka, pengembangan industri galangan Kapal, Dukungan pengembangan industri hasil tambang dan pengembangan industri alat angkut (otomotif) daerah

KEBIJAKAN	PROGRAM
Mendorong dan menumbuhkembangkan IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial, promosi IKM serta penyediaan informasi pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya cultural/budaya setempat dan atau Teknologi Informasi, serta penyediaan tempat konsultasi teknis dan bisnis	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Industri Kreatif

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Industri Kreatif ; dengan kegiatan utama : Dukungan operasional Unit Pendampingan langsung serta penyuluh IKM ke sentra dan unit usaha IKM, Penumbuhan dan pengembangan One Village One Product (OVOP), Penumbuhan & pengembangan Wirausaha Baru IK Desa Model, Pengembangan IKM daerah Perbatasan, Pengembangan IKM kreatif basis seni budaya, Fashion, Jewelry, dan IT. Dukungan pengembangan sistim mutu IKM, penghargaan IKM (UPAKARTI) dan Promosi IKM daerah di tingkat lokal, nasional dan internasional

KEBIJAKAN	PROGRAM
Memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha, mendorong berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, mendorong integrasi aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dan 2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dengan kegiatan utama : Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG; Monev dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pasar Percontohan; Penyediaan outlet pemasaran Kerajinan Kalbar Dalam Rangka Perluasan Produk Kerajinan Kalbar; Partisipasi Pada Pameran Produk Dalam Negeri; Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan; Partisipasi Pada Pertasikencana, Lingkungan Hidup dan Hari Pangan Sedunia; Monitoring Stok Perdagangan Antar Pulau; Monitoring dan Pengawasan Barang- Barang Dalam Pengawasan; serta penumbuhan dan pengembangan Resi Gudang dan Pasar Lelang di daerah

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; dengan kegiatan utama : Pemberdayaan Perlindungan Konsumen; Pengawasan Barang Beredar; Pembinaan dan Pengawasan Kemetrolagian; peningkatan kapasitas serta Operasional Pelayanan UPT Kemetrolagian Pontianak dan Singkawang

KEBIJAKAN	PROGRAM
Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkualitas dan berdaya saing ditunjang pemantauan dan pengawasan atas impor daerah	1. Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri; dan 2. Program Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri; dengan kegiatan utama : Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Lintas Batas; Pemutakhiran Data Importir / Eksportir; Forum Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Kalbar; Penumbuhan dan pengembangan Trade Center Kalbar; Forum kerjasama ekonomi sub-regional (Sosekmalindo dan BIMP –EAGA), Dukungan Pembahasan Border Trade Agreement (BTA); Pembinaan dan monev kebijakan Perdagangan luar Negeri; dan Peningkatan Kapasitas dan operasional Pelayanan Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang

Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan utama : Partisipasi pada promosi ekspor daerah di dalam dan luar negeri serta Misi Dagang ke Luar Negeri; peningkatan pelayanan Daglu online (E-SKA dan API Online); Peningkatan Informasi Ekspor; Penyusunan Profil dan Pemetaan Komoditi dan Pelaku Ekspor; Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah; dan Peningkatan Kemampuan eksportir Daerah

KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi pengembangan indag dengan instansi terkait baik di Pusat dan daerah untuk sinkronisasi dan sinergisitas dengan didukung data potensi berbasis kewilayahan (spatial) yang handal, didukung penguatan SDM aparatur serta peningkatan kualitas kinerja pelayanan internal dan eksternal yang berkelanjutan	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan Daerah

Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan Daerah terbagi atas beberapa sub Program yang meliputi : Program Pengembangan Perencanaan Bidang Indag, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah dengan kegiatan utama : Penyediaan data spatial industri dan Perdagangan; Rapat koordinasi pengembangan Indag, partisipasi pada Rapat kerja terkait indag di pusat dan daerah termasuk Musrenbang Kab/Kota, Provinsi dan Nasional terkait penyusunan dokumen perencanaan pengembangan indag daerah ; Monitoring dan evaluasi pengembangan Indag Kalbar; operasional pelayanan kantor;

penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan peningkatan SDM Aparatur; dan penyusunan laporan kinerja dan keuangan.

Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Selanjutnya untuk mengetahui Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat di lihat tabel berikut ini :

Tabel 5.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Program dan Unit Penanggung Jawab

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2012	TARGET 2013	TARGET TAHUN					PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
					2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalimantan Barat	1 Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar Per tahun	%	3,1	3	3	3	3	4	5	Program Pengembangan IKAHH & ILMEA	Bidang IKAHH & ILMEA
	2 Jumlah Pertambahan Industri	%	-	2	2	2	2,5	3	3		
	3 Jumlah kawasan industri yang difasilitasi	kawasan	-	2	4	5	6	6	6		
	4 Dukungan persebaran & penguatan industri	Kab/kota	14	14	14	14	14	14	14		
	5 jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi	Unit Usaha	-	3	3	4	5	6	7	Program Pengembangan IKAHH	Bidang IKAHH
	jumlah industri Prioritas provinsi yang difasilitasi	Unit Usaha	-	1	2	3	4	5	6		
	6 Jumlah industri yang difasilitasi melalui penerapan industri hijau	unit usaha	-	-	3	3	4	4	4		
	7 Jumlah Rekomendasi IUI yang diterbitkan	dokumen	0	0	3	3	3	5	5		
	8 Dukungan pengembangan Alsintan centre	Kab/kota	1	1	1	1	1	1	1		
	9 Pengembangan Industri alat angkut	unit usaha	0	1	1	1	1	1	1	Program Pengembangan ILMEA	Bidang ILMEA
	10 Pengembangan Industri galangan Kapal	Lokasi	0	1	1	1	1	1	1		
11 Dukungan hilirisasi bahan tambang	Komoditi	0	1	1	1	1	1	1			

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2012	TARGET 2013	TARGET TAHUN					PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
					2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Tumbuh dan berkembangnya IKM Kalimantan Barat	1 pertumbuhan jumlah IKM Formal Kalbar	%	-	1,5	1,5	1,75	2	2	2	Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	Bidang ILMEA/IKAH & UPIKM
	2 jumlah IKM Kalbar yang difasilitasi	Unit usaha	30 unit	60 unit	65 unit	70 unit	75 unit	80 unit	90 unit		
	3 Sentra industri kreatif basis IT	Lokasi	0	0	1	1	1	1	1		
	4 Jumlah IKM Wira Usaha Baru yang tumbuh dan Berkembang	Unit Usaha		100	100	125	150	175	200		
3. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah	1 Laju inflasi Kalimantan Barat	%	6,62	5,47	5,76	6	5,5	5	4,5	Program Peningkatan Efisiensi Perdag. Dalam Negeri	Bidang Dagri
	2 produk yang dipromosikan dalam negeri	Jenis		4	4	6	8	10	12		
	3 Jumlah Gudang dengan sistim resi gudang	Unit	0	1	1	2	3	4	5		
	4 Jumlah pasar tradisional yang dibina	pasar	4	4	7	8	8	9	9		
	5 Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata	prshn		2500	3046	3230	3400	3570	3740		
	6 Jumlah pengaduan konsumen	kasus	35	40	45	52	57	60	65	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Bidang Dagri, Metrologi SKW, Metrologi PNK
	7 jumlah Wajib Tera/tera Ulang	org		2000	2000	2300	2475	2500	2600		
	8 Jumlah barang beredar yang diawasi	Jenis	6	6	10	12	15	18	22		
	9 Jumlah BPSK yang terbentuk	Kab/kota	3	4	4	5	6	7	8		
	10 Pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan Lab Kemetrolgian	ruang lingkup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	11 Peningkatan jumlah & kompetensi SDM Kemetrolgian	orang	24	24	24	24	24	24	24		
	12 jumlah alat UTP yang ditera/tera ulang	Unit	25.455	28.313	29.000	27.500	28.000	28.500	29.000		
	13 Persentase daerah / kecamatan yang dilayani	%	71	68	71	75	79	79	79		

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2012	TARGET 2013	TARGET TAHUN					PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
					2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor	1 Neraca Perdagangan	Juta US\$		802,70	842,90	901,80	964,98	1.051,83	1.146,49	Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri	Bid. Daglu & UPSMB
	2 Kerjasama Ekonomi Regional	dokumen	1	1	1	1	1	1	1		
	3 Pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan Lab pengujian & Kalibrasi sertifikasi mutu barang	ruang lingkup	5	9	9	9	9	12	12		
	4 Jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya	orang	7	6	10	12	14	15	15		
	5 Jumlah Pengujian Mutu produk	sample	126	150	200	200	250	250	300		
	6 Jumlah kalibrasi alat lab	alat	185	300	300	300	350	350	350		
	7 Nilai ekspor Kalimantan Barat	Juta US\$	1.303,86	1.583,06	1.693,87	1.812,45	1.939,32	2.075,07	2.220,32	Program Pengembangan Ekspor	Bid. Daglu
	8 Pelayanan Dokumen Ekspor impor secara online	dokumen	1500	1600	1600	1650	1650	1700	1700		
	9 Jumlah Eksportir baru	Unit Usaha	0	5	7	7	7	8	8		
	10 Jumlah Kontak Dagang	Kali	0	3	5	5	7	7	9		
5.Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	1 Operasional pelayanan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan Daerah	Sekretariat
	2 Jumlah dokumen perencanaan Indag Kalbar	dokumen	1	2	2	2	2	2	2		
	3 Data spatial indag Kalbar	Kab/kota	0	3	6	9	11	13	14		
	4 Peningkatan SDM aparatur Indag	orang	12	50	37	40	40	45	45		
	5 Jumlah Forum sinergi Pengembangan Indag	Forum	1	1	1	1	1	1	1		

Untuk pendanaan Indikatif terdapat pada lampiran Renstra ini

INDIKATOR KINERJA DAERAH (RPJMD)

Seperti yang diuraikan pada bab 3, misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 seperti yang tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2013 yang terkait bidang Industri dan Perdagangan adalah misi ke 8 (delapan) yaitu

“Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya”. (focus bidang indag)

*Cuplikan Misi ke delapan RPJMD Provinsi Kalbar 2013-2018
(Perda no. 5 tahun 2013)*

Dari misi kedelapan diatas, tujuan yang menjadi acuan Dinas Perindag Provinsi Kalbar dalam menyusun Renstra ini adalah tujuan (5) yaitu Meningkatkan daya saing Daerah. Dengan sasaran Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi dan pengamanan perdagangan; serta tujuan (6) yaitu Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi dengan sasaran Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal

Untuk melihat keterkaitan antara RPJMD Kalbar 2013 – 2018 dengan Rencana Strategis Dinas Perindag Provinsi Kalbar dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Bidang Urusan, Nama Program dan SKPD Penanggung Jawab

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
<i>Misi 8 : "Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya"</i>						
5. Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor dan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistim distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitasi standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Program Peningkatan daya Saing dan Penguatan Perdagangan luar negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengembangan Ekspor	
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
6. Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi	Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal	Revitalisasi Industri melalui peluang hilirisasi Komoditi Utama daerah dan penguatan struktur Industri Daerah	Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang mengolah komoditi utama daerah, industri peralatan dan mesin yang mendukung pengembangan sektor primer dan IKM unggulan Provinsi	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan aneka	
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Industri Kreatif	
					Program dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan Daerah	

Sumber : Perda nomor 5 tahun 2013 tentang RPJMD Kalbar 2013-2018

A. Indikator Kinerja Daerah (RPJMD) Urusan Perdagangan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalbar 2013-2018 (Perda no. 5 tahun 2013) Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah sektor perdagangan yang merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome dari program-program pembangunan daerah setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.a.1
Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah

Aspek / Fokus / Bidang urusan / indikator kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2012	Perkiraan 2013	Target/Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
Fokus layanan Urusan Pilihan Sektor Perdagangan (Ekspor US\$ Juta)	1303.86	1583.36	1693.87	1812.45	1939.32	2075.07	2220.32

Sumber : Perda nomor 5 tahun 2013 tentang RPJMD Kalbar 2013-2018

Selanjutnya, berdasarkan table 6.1. dapat diketahui bahwa yang menjadi arah pelaksanaan urusan perdagangan dalam RPJMD Kalbar 2013-2018 adalah tujuan 5. Meningkatkan daya saing daerah, dengan sasaran Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh ditempuh strategi Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor dan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan arah kebijakannya Meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistim distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitasi standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan. Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Program utama dan indikator kinerja program pada RPJMD Kalbar 2013-2018 sesuai perda nomor 5 tahun 2013 adalah sbb:

1. Program Peningkatan daya Saing dan Penguatan Perdagangan luar negeri, dengan indikator kinerja program adalah :
 - a. Neraca perdagangan Kalbar (US\$)
 - b. Jumlah Pengujian Produk (sample)
 - c. Jumlah kalibrasi alat lab (unit)

Target Indikator kinerja program a tersebut menjadi tanggung jawab bidang Perdagangan Luar Negeri dan Target Indikator kinerja program b dan c menjadi tanggung jawab Unit pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPSMB) Pontianak
2. Program Pengembangan Ekspor, dengan indikator kinerja
 - a. Nilai ekspor Kalbar (US\$)
 - b. Jumlah Eksportir baru yang tumbuh (unit usaha)

c. Jumlah dokumen ekspor impor yang dilayani secara on line (dokumen)
Target Indikator kinerja program tersebut menjadi tanggung jawab bidang Perdagangan Luar Negeri

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan indikator kerja program :

- a. Laju inflasi (%)
- b. Jumlah gudang dengan sistem resi gudang (unit)
- c. Jumlah pasar tradisional yang dibina (unit)

Target Indikator kinerja program tersebut menjadi tanggung jawab bidang Perdagangan Dalam Negeri

4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan indikator program :

- a. Jumlah BPSK (kab/kota)
- b. Jumlah aduan konsumen
- c. Barang beredar yang diawasi (jenis)
- d. Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang (Unit)

Target Indikator kinerja program a, b dan c tersebut menjadi tanggung jawab bidang Perdagangan Dalam Negeri. Sedangkan target indikator kinerja program d menjadi tanggung jawab Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak dan Unit Pelayanan Kemetrolgian Singkawang

Untuk mengetahui target kinerja per tahun setiap program utama daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 6.2.a.2 di bawah ini

Tabel 6.2.a.2.

Bidang Urusan Perdagangan, Indikator Kinerja Program dan Unit Penanggung Jawab

Bidang Urusan dan Nama Program	Indikator Kinerja Program	KONDISI TAHUN 2012	Target Kinerja dan Indikasi Pendanaan												SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013		2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Urusan Perdagangan															
Program Peningkatan daya Saing dan Penguatan Perdagangan luar negeri	Neraca Perdagangan (US\$ Juta)	1303,86	802,7	577	842,9	866	901,8	1.100	964,98	1.250	1051,83	1.450	1146,49	1.750	Disperindag
	Jumlah Pengujian Produk (sample)	126	150	1700	160	2.050	180	2.357	200	2.711	220	3.117	240	3.585	Disperindag (UPSMB Ptk)
	Jumlah Kalibrasi alat lab (unit)	185	300		300		300		300		350		350		
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor Kalbar (US\$ Juta)	1303,86	1583,06	722	1693,87	885	1812,45	913	1939,32	1.065	2075,07	1.403	2220,32	1.786	Disperindag
	Jumlah Eksportir baru yang tumbuh (Unit Usaha)	5	7		7		7		7		8		8		
	Jumlah dokumen Ekspor-impor yang dilayani secara online (dokumen)	1500	1600		1600		1650		1650		1700		1700		
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Laju Inflasi (%)	6,62	5,47	989	5,76	1.200	6	1.405	5.50	1.673	5.00	1.800	4.50	2.025	Disperindag
	Jumlah Gudang dengan system Resi gudang (Unit)	0	1		1		2		2		2		2		
	Jumlah pasar tradisional yang dibina (unit)	4	4		4		5		5		6		8		
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah BPSK (kab/kota)	3	4	312	4	500	5	550	5	575	6	600	7	625	Disperindag
	Jumlah aduan konsumen	35	40		45		52		57		60		65		
	Barang beredar yang diawasi (jenis)	6	8		8		12		12		12		12		
	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang (Unit)	25.455	28.313	3.200	28.500	3.608	27.000	4.150	27.250	4.771	28.000	5.487	28.250	6.310	Disperindag (UPKmetrologian Pontianak & Singkawang)

Sumber : Perda nomor 5 tahun 2013 tentang RPJMD Kalbar 2013-2018

Untuk mengetahui keterkaitan antara Indikator kinerja sasaran Pembangunan daerah, Program utama, Indikator Kinerja Program RPJMD Provinsi Kalbar 2013-2018 dengan program, Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Perindag Provinsi Kalbar 2013-2018 urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel 6.2a.3 sebagai berikut :

Tabel 6.2.a.3.

Keterkaitan antara Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Program utama, Indikator Kinerja Program RPJMD Provinsi Kalbar 2013-2018 dengan program, Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Perindag Provinsi Kalbar 2013-2018 (Urusan Perdagangan)

RPJMD PROVINSI KALBAR 2013-2018 (PERDA NO. 5 TAHUN 2013)			RENSTRA DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR 2013-2018			
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan Nama Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nama Program	Unit Penanggung Jawab
1	1	2	3	4	5	6
Urusan Perdagangan			Urusan Perdagangan			
Ekspor (US\$ Juta)	Program Peningkatan daya Saing dan Penguatan Perdagangan luar negeri	Neraca Perdagangan (US\$ Juta)	Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor	Neraca Perdagangan (US\$ Juta)	Peningkatan daya Saing dan Penguatan Perdagangan luar negeri	Bidang Perdagangan Luar Negeri
		Jumlah Pengujian Produk (sample)		Kerjasama Ekonomi Regional (dokumen)		
		Jumlah Kalibrasi alat lab (unit)		Jumlah Pengujian Produk (sample)		
				Jumlah Kalibrasi alat lab (unit)		
				Pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan Lab pengujian & Kalibrasi sertifikasi mutu barang (%)		
	Jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya (org)			UPSMB Pontianak		

RPJMD PROVINSI KALBAR 2013-2018 (PERDA NO. 5 TAHUN 2013)			RENSTRA DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR 2013-2018			
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan Nama Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nama Program	Unit Penanggung Jawab
1	1	2	3	4	5	6
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor Kalbar (US\$ Juta)		Nilai ekspor Kalbar (US\$ Juta)	Pengembangan Ekspor	Bidang Perdagangan Luar Negeri
		Jumlah Eksportir baru yang tumbuh (Unit Usaha)		Jumlah Eksportir baru yang tumbuh (Unit Usaha)		
		Jumlah dokumen Ekspor-impor yang dilayani secara on line (dokumen)		Jumlah dokumen Ekspor-impor yang dilayani secara on line (dokumen)		
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Laju Inflasi (%)	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah	Laju Inflasi (%)	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		Jumlah Gudang dengan system Resi gudang (Unit)		Jumlah Gudang dengan system Resi gudang (Unit)		
		Jumlah pasar tradisional yang dibina (unit)		Jumlah pasar tradisional yang dibina (unit)		
				produk yang dipromosikan dalam negeri (jenis)		
				Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata (prshn)		
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah BPSK (kab/kota)		Jumlah BPSK (kab/kota)	Perlindungan Konsumen	Bidang perdagangan Dalam negeri
		Jumlah aduan konsumen		Jumlah aduan konsumen		
		Barang beredar yang diawasi (jenis)		Barang beredar yang diawasi (jenis)		
		Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang (Unit)		jumlah Wajib Tera/tera Ulang (org)		UP Kemetrolgian Pontianak & UP

RPJMD PROVINSI KALBAR 2013-2018 (PERDA NO. 5 TAHUN 2013)			RENSTRA DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR 2013-2018			
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan Nama Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nama Program	Unit Penanggung Jawab
1	1	2	3	4	5	6
				Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang (Unit)		Kemetrologian Singkawang
				Persentase daerah / kecamatan yang dilayani (%)		
				Pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan Lab Kemetrologian (%)		
				Peningkatan jumlah & kompetensi SDM Kemetrologian (org)		

B. Indikator Kinerja Daerah (RPJMD) Urusan Perindustrian

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalbar 2013-2018 (Perda no. 5 tahun 2013) Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah sektor industri pengolahan yang merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome dari program-program pembangunan daerah setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.b.1
Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah

Aspek / Fokus / Bidang urusan / indikator kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2012	Perkiraan 2013	Target/Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
Fokus layanan Urusan Pilihan Sektor Industri Pengolahan (IKM)	48	86	100	125	150	175	200

Sumber : Perda nomor 5 tahun 2013 tentang RPJMD Kalbar 2013-2018

IKM yang dimaksud adalah Unit Usaha dan atau sentra Industri Kecil dan Menengah yang difasilitasi pembentukan dan penguatannya sehingga menjadi IKM yang berdaya saing. Selanjutnya, berdasarkan table 6.1. dapat diketahui bahwa yang menjadi arah pelaksanaan urusan perindustrian dalam RPJMD Kalbar 2013-2018 adalah tujuan 6. Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi dengan sasaran Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui strategi Revitalisasi Industri melalui peluang hilirisasi Komoditi Utama daerah dan penguatan struktur Industri Daerah dengan arah kebijakan Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang mengolah komoditi utama daerah, industri peralatan dan mesin yang mendukung pengembangan sektor primer dan IKM unggulan Provinsi.

Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Program utama dan indikator kinerja program pada RPJMD Kalbar 2013-2018 sesuai perda nomor 5 tahun 2013 adalah sbb:

1. Perindustrian Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) , dengan indikator kinerja program adalah :
 - a. Jumlah Rekomendasi IUI yang diterbitkan
 - b. Jumlah Kawasan industri yang difasilitasi
 - c. Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi (unit usaha)
 - d. Jumlah Industri Prioritas yang difasilitasi (unit Usaha)

Target Indikator kinerja program tersebut menjadi tanggung jawab bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan

2. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, dengan indikator kinerja program adalah :

- a. Dukungan Pengembangan Alsintan Centre (Lokasi)
- b. Pengembangan Industri alat angkut (unit Usaha)
- c. Pengembangan Industri galangan Kapal (lokasi)
- d. Dukungan Hilirisasi bahan tambang (komoditi)

Target Indikator kinerja program tersebut menjadi tanggung jawab bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Industri Kreatif, dengan indikator kinerja program adalah :

- a. Jumlah IKM yang difasilitasi pengembangan usahanya (unit usaha)
- b. Sentra Industri Kreatif basis IT (lokasi)
- c. Jumlah Wira Usaha Baru IKM yang tumbuh dan berkembang melalui pelatihan dan pendampingan (Unit Usaha)

Target Indikator kinerja program tersebut menjadi tanggung jawab bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan , bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dan Unit Pelatihan IKM

4. Program dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan Daerah, dengan indikator kinerja program adalah :

- a. Operasional pelayanan kantor(bulan)
- b. Data spatial bidang indag (kab/kota)
- c. Jumlah Forum sinergi Pengembangan Indag (kali)
- d. Laju Pertumbuhan industri (%)

Target Indikator kinerja program a, b, dan c tersebut menjadi tanggung jawab sekretariat. Sedangkan target indikator kinerja program d menjadi tanggung jawab sekretariat, bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan , dan bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

Untuk mengetahui target kinerja per tahun setiap program utama daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 6.2.b.2. di bawah ini

Tabel 6.2.b.2
Bidang Urusan Perindustrian, Indikator Kinerja Program dan Unit Penanggung Jawab

Bidang Urusan dan Nama Program	Indikator Kinerja Program	KONDISI TAHUN 2012	Target Kinerja dan Indikasi Pendanaan										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			2013		2014		2015		2016		2017			2018	
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		Target	Rp. (Juta)
Urusan Perindustrian															
Program dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan Daerah	Operasional pelayanan kantor(bulan)	12	12	3799	12	4.345	12	4.996	12	5.745	12	6.607	12	7.600	Disperindag
	Data spatial bidang indag (kab/kota)	0	8		9		10		11		13		14		
	Jumlah Forum sinergi Pengembangan Indag	1	1		1		1		1		1		1		
	Laju Pertumbuhan industri (%)	3,1	3		3		3		3		4		5		
Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan hasil hutan (IKAHH)	Jumlah Rekomendasi IUI yang diterbitkan	0	0	2640	3	2.600	3	2.989	3	3.438	5	3.950	5	4.530	Disperindag
	Jumlah Kawasan industri yang difasilitasi	0	2		3		3		3		3		4		
	Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi (unit usaha)	0	3		3		3		4		5		7		
	Jumlah Industri Prioritas yang difasilitasi (unit Usaha)	0	1		2		2		2		3		3		
Program Pengembangan Industri Logam Mesin elektronika dan aneka	Dukungan Pengembangan Alsintan Centre (Lokasi)	1	1	589	1	677	1	779	1	896	1	1.030	1	1.185	Disperindag
	Pengembangan Industri alat angkut (unit Usaha)	0	0		1		1		1		1		1		
	Pengembangan Industri galangan Kapal (lokasi)	0	0		1		1		1		1		1		
	Dukungan Hilirisasi bahan tambang (komoditi)	0	0		1		1		1		1		1		
Program Pengembangan IKM & Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi pengembangan usahanya (unit usaha)	30	60	972	65	1.118	65	1.286	70	1.479	70	1.700	75	1.955	Disperindag

Bidang Urusan dan Nama Program	Indikator Kinerja Program	KONDISI TAHUN 2012	Target Kinerja dan Indikasi Pendanaan												SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013		2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Urusan Perindustrian															
Kreatif	Sentra Industri Kreatif basis IT (lokasi)	0	0		1		1		1		1		1		Disperindag (Unit Pelatihan IKM)
	Jumlah Wira Usaha Baru IKM yang tumbuh dan berkembang melalui pelatihan dan pendampingan (Unit Usaha)	48	48	2150	60	2.450	80	2.817	100	3.240	125	3.726	150	4.150	

Sumber : Perda nomor 5 tahun 2013 tentang RPJMD Kalbar 2013-2018

Untuk mengetahui keterkaitan antara Indikator kinerja sasaran Pembangunan daerah, Program utama, Indikator Kinerja Program RPJMD Provinsi Kalbar 2013-2018 dengan program, Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Perindag Provinsi Kalbar 2013-2018 urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel 6.2.b.3 sebagai berikut :

Tabel 6.2.b.3.

Keterkaitan antara Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Program utama, Indikator Kinerja Program RPJMD Provinsi Kalbar 2013-2018 dengan program, Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Perindag Provinsi Kalbar 2013-2018 (Urusan Perindustrian)

RPJMD PROVINSI KALBAR 2013-2018 (PERDA NO. 5 TAHUN 2013)			RENSTRA DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR 2013-2018			
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan Nama Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nama Program	Unit Penanggung Jawab
1	1	2	3	4	5	6
Urusan Perindustrian			Urusan Perindustrian			
Sektor Industri Pengolahan (IKM)	Program dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan Daerah	Operasional pelayanan kantor(bulan)	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	Operasional pelayanan kantor(bulan)	1. Program Pengembangan Perencanaan Bidang Indag, 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, 7. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	Sekretariat
		Data spatial bidang indag (kab/kota)		Peningkatan SDM aparatur Indag (orang)		
		Jumlah Forum sinergi Pengembangan Indag		Data spatial bidang indag (kab/kota)		
		Jumlah Forum sinergi Pengembangan Indag		Jumlah dokumen perencanaan Indag Kalbar		

RPJMD PROVINSI KALBAR 2013-2018 (PERDA NO. 5 TAHUN 2013)			RENSTRA DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR 2013-2018				
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan Nama Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nama Program	Unit Penanggung Jawab	
1	1	2	3	4	5	6	
		Laju Pertumbuhan industri (%)	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalimantan Barat	Laju Pertumbuhan industri (%)	1. Program Industri Kimia, agro dan hasil hutan	Bidang IKAH	
				Jumlah Pertambahan Industri			2. Program Industri logam, mesin elektronika dan Aneka
		Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan hasil hutan (IKAHH)		Jumlah Kawasan industri yang difasilitasi	Jumlah kawasan industri yang difasilitasi	Program Industri Kimia, agro dan hasil hutan	
	Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi (unit usaha)			Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi (unit usaha)			
	Jumlah Industri Prioritas yang difasilitasi (unit Usaha)			Jumlah Industri Prioritas yang difasilitasi (unit Usaha)			
	Jumlah Rekomendasi IUI yang diterbitkan			Jumlah industri yang difasilitasi melalui penerapan industri hijau			
	Program Pengembangan Industri Logam Mesin elektronika dan aneka	Dukungan Pengembangan Alsintan Centre (Lokasi)		Jumlah Rekomendasi IUI yang diterbitkan	Dukungan Pengembangan Alsintan Centre (Lokasi)	Program Industri logam, mesin elektronika dan Aneka	Bidang ILMEA
		Pengembangan Industri alat angkut (unit Usaha)		Dukungan Pengembangan Industri alat angkut (unit Usaha)			
		Pengembangan Industri galangan Kapal (lokasi)		Pengembangan Industri galangan Kapal (lokasi)			
		Dukungan Hilirisasi bahan tambang (komoditi)		Dukungan Hilirisasi bahan tambang (komoditi)			

RPJMD PROVINSI KALBAR 2013-2018 (PERDA NO. 5 TAHUN 2013)			RENSTRA DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR 2013-2018				
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Bidang Urusan dan Nama Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nama Program	Unit Penanggung Jawab	
1	1	2	3	4	5	6	
	Program Pengembangan IKM & Industri Kreatif	Jumlah IKM yang difasilitasi pengembangan usahanya (unit usaha)	Tumbuh dan berkembangnya IKM Kalimantan Barat	Pertumbuhan jumlah IKM Formal Kalbar	Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	Bidang IKAHH	
		Sentra Industri Kreatif basis IT (lokasi)		Jumlah IKM yang difasilitasi pengembangan usahanya (unit usaha)			Bidang ILMEA
		Jumlah Wira Usaha Baru IKM yang tumbuh dan berkembang melalui pelatihan dan pendampingan (Unit Usaha)		Jumlah Wira Usaha Baru IKM yang tumbuh dan berkembang melalui pelatihan dan pendampingan (Unit Usaha)			

Saya berharap bahwa segenap aparat Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Barat harus merapatkan barisan, bekerja secara professional, kreatif dan inovatif mencari terobosan, berupaya meningkatkan kompetensi diri secara terus menerus dan membangun jejaring kerja dengan stakeholder lainnya mengingat pengembangan industri dan perdagangan 5 tahun kedepan harus mampu menjawab tantangan terkini terutama dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi Kalbar yang berkualitas dan untuk menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 (MEA/AEC 2015).

Dalam menghadapi MEA 2015 dengan segala peluang dan tantangannya perlu ditanggapi dengan sikap menyatukan visi dan langkah-langkah dari wacana-wacana yang berkembang baik di dunia usaha, akademisi, maupun lingkup pemerintah menjadi suatu langkah aksi yang nyata. Upaya tersebut harus di landasi dengan membuang segala pesimisme menjadi optimisme terhadap MEA 2015. Karena jika tidak saat ini Kalbar tidak siap dengan MEA 2015, maka akan lebih sulit lagi Kalbar menghadapi persaingan global kedepan.

Secara umum, nilai ekspor Kalimantan Barat tidak akan terpengaruh oleh MEA 2015, karena komoditi ekspor Kalbar adalah berbentuk bahan mentah (hasil tambang) maupun industri hulu yang merupakan bahan baku industri pengolahan di dunia seperti (Crumb Rubber dan kedepannya CPO). Namun demikian jika Kalimantan Barat tidak segera mempersiapkan upaya-upaya hilirisasi komoditi utama tersebut, maka pada jangka panjang Kalbar akan sulit untuk bersaing di tingkat global, nasional, regional bahkan ditingkat lokal/dosmestik.

Disisi lain dilihat dari komponen yang dominan PDRB Penggunaan Kalbar dalam 5 (lima) tahun terakhir (2008-2012) adalah Konsumsi Rumah Tangga dimana mencapai rata-rata pada kurun waktu tersebut diatas 52 % . Hal ini berarti peranan konsumsi rumah tangga wajib kita lihat sebagai potensi besar yang perlu dimanfaatkan sebagai pasar dan penggerak ekonomi lokal, jika tidak potensi ini akan dimanfaatkan oleh produk dari luar, seperti yang telah terjadi saat ini baik produk dari luar negeri (ex-impor) maupun produk dalam negeri (ex-produk luar Kalbar).

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sesuai Rencana Strategis ini untuk memperkuat langkah-langkah konkrit yaitu :

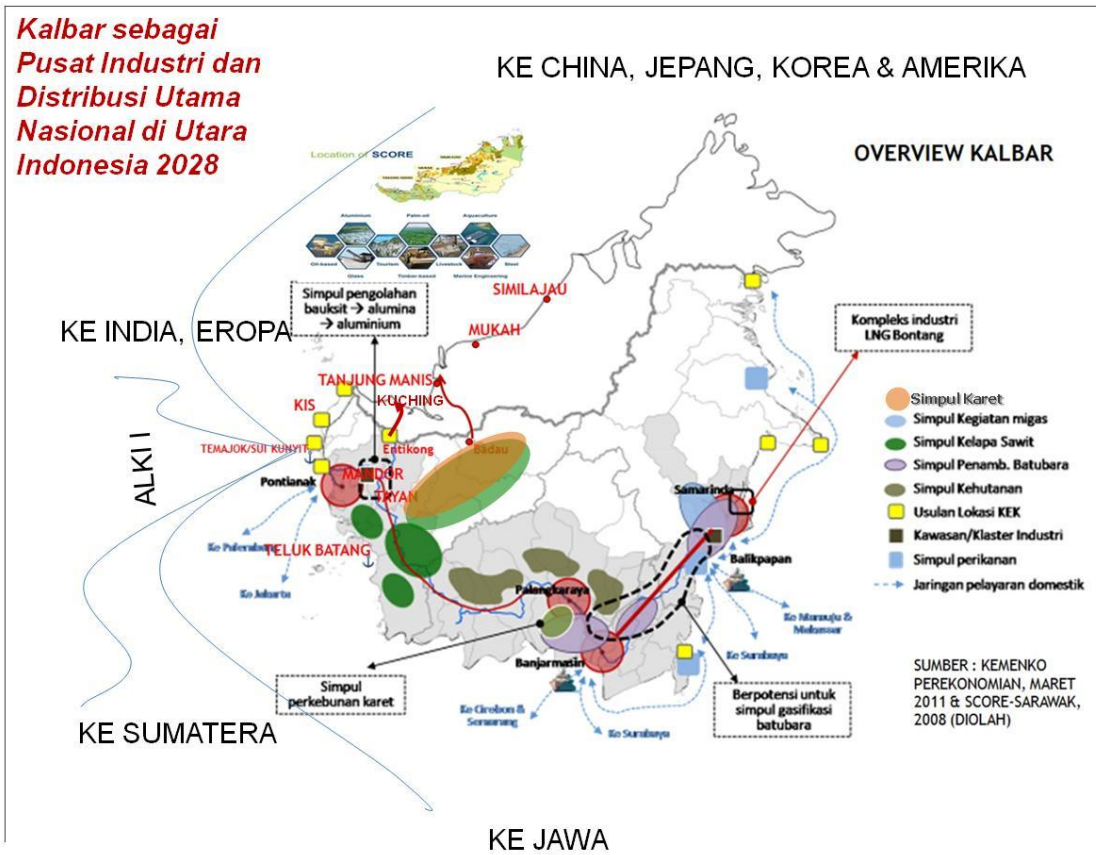
1. **Menyiapkan basis produksi/industri daerah yang bestruktur kuat dan berdaya saing, melalui** fasilitasi penyiapan Kawasan Industri; Hilirisasi komoditi utama Kalbar (karet dan sawit); pengembangan IKM Kabupaten/Kota yang diarahkan dalam bentuk ***one village one product/OVOP*** (desa mandiri industri) dan kompetensi inti daerah sesuai arahan Peraturan Presiden no 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN); Pengembangan dan penyebaran IKM; dan
2. **Mengamankan Pasar Lokal, dengan hambatan non tariff berasas kemandirian yaitu dengan** Pengawasan Barang beredar SNI-Wajib dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) di pasaran utamanya produk-produk ex-impor; Menggencarkan **kampanye 100% Indonesia / Aku Cinta Produk Indonesia dan gerakan Kosumen cerdas** agar konsumen Kalbar lebih mencintai, menghargai dan memakai produk nasional utamanya produk lokal Kalbar; dan kedepannya dengan upaya-upaya pemerintah daerah di sektor pertanian mengembangkan penyediaan makanan segar (Fresh food) dan sektor industri penyediaan olahan makanan (Processed food) yang berkualitas, cukup dan aman bagi masyarakat Kalbar, gerakan nasional ini akan kita intensifkan menjadi gerakan ***Aku Cinta Produk-Produk Kalimantan Barat / 100% Kalbar***. Sehingga kontribusi 52% Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB Kalbar akan dapat meningkatkan peranan IKM khususnya pangan dan lebih optimal menggerakkan ekonomi lokal daerah.

Akhir kata, diharapkan segenap jajaran Pemerintah Kalimantan Barat terus mendukung upaya pemerintah pusat (kementerian Perindustrian) untuk menjadikan Kalbar sebagai pusat pengolahan aluminium dan kelapa sawit serta Karet terutama di kawasan industri Tayan, dan Mandor, dimana secara tata ruang telah dimasukan sebagai kawasan strategis provinsi (KSP); dan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar Kalimantan Barat dapat menjadi salah satu simpul penting dalam Sistem logistik nasional, baik yang berada di ALKI I maupun di perbatasan (pembangunan pelabuhan internasional dan terminal darat di badau dan entikong) Untuk itu selain penyediaan pelabuhan laut dan darat yang representatif, juga diperlukan dukungan pemerintah pusat menyiapkan pusat-pusat distribusi baik berupa pasar tradisional, kawasan pergudangan dan sistem resi gudang serta penyediaan trade centre yang dapat memfasilitasi pemasaran produk-produk utamanya UMKM Kalbar. Niscaya harapan Kalimantan Barat pada tahun 2028 dapat menjadi

“Pusat Industri Baru Di Luar Pulau Jawa Dan Pusat Distribusi Nasional Yang Melayani Sumatera Dan Jawa”

Seperti ilustrasi gambar dibawah ini :

Kalbar sebagai Pusat Industri dan Distribusi Utama Nasional di Utara Indonesia 2028



Gambar 7.1. Ilustrasi Kalbar 2028 sebagai **“Pusat Industri Baru Di Luar Pulau Jawa Dan Pusat Distribusi Nasional Yang Melayani Sumatera Dan Jawa”**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018 (DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR)

Lampiran I

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pengembangan Industri Kimia Agro Dan Hasil Hutan	1.1. Fasilitas Percepatan Pembangunan Kawasan Industri	output	1 kawasan	4 kawasan	5 kawasan	6 kawasan	6 kawasan	6 kawasan
		Rp.	583,174,500	160,000,000				
	1.2.a. Pengkajian Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)	output	2 naskah	2 naskah				
		Rp.	499,897,950	250,000,000				
	1.2.b. Dukungan Pengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah	output	KIID 3 kabupaten					
		Rp.	224,202,450					
	1.3. Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit	output			3 unit usaha	4 unit usaha	5 unit usaha	6 unit usaha
		Rp.						
	1.4. Pengembangan Industri Pengolahan Ikan	output	2 komoditi	4 unit usaha	5 unit usaha	6 unit usaha	7 unit usaha	8 unit usaha
		Rp.	282,903,500	400,000,000				
	1.5. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Kimia, Agro	output		4 rakor	4 rakor	4 rakor	4 rakor	4 rakor
		Rp.		125,000,000				
	1.6. Aplikasi Data Base Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan	output		1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah
		Rp.		255,000,000				
	1.7. Promosi Produk Industri Kalbar	output			1 event	1 event	1 event	1 event
		Rp.						
	1.8. Partisipasi Pada Promosi Produk Industri Unggulan Provinsi, Industri Pangan dan Hasil Perkebunan & Hasil Kehutanan	output		4 event	4 event	4 event	4 event	4 event
		Rp.		75,000,000				
	1.9. Kajian road map kawasan industri	output			1 naskah			
		Rp.			320,000,000			
1.10. Kajian Industri Hilir Pengolahan Turunan CPO	output				1 naskah			
	Rp.							
1.11. Kajian Industri Hilir Pengolahan Karet	output				1 naskah			
	Rp.							
1.12. Kajian Industri Hilir Pengolahan Pupuk dan Pakan Ternak	output				1 naskah			
	Rp.							
1.13. Kajian Industri Hilir Pengolahan Makanan dan Minuman Berbasis Agro	output				1 naskah			
	Rp.							

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.14. Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Dalam (Pangan)	output		2 unit usaha	3 unit usaha	3 unit usaha	3 unit usaha	3 unit usaha
		Rp.		350,000,000				
	1.15. Fasilitas Pendirian Industri Hilir Berbasis Kelapa Dalam (Non Pangan)	output		4 unit usaha	4 unit usaha	4 unit usaha	4 unit usaha	4 unit usaha
		Rp.		100,000,000				
	1.16. Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Hilir Karet	output	2 unit, 20 orang	3 unit usaha	4 unit usaha	5 unit usaha	6 unit usaha	7 unit usaha
		Rp.	268,008,550	360,000,000				
	1.17. Implementasi Rencana Aksi Daerah Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Industri	output	1 kel kerja	4 unit usaha	4 unit usaha	4 unit usaha	4 unit usaha	4 unit usaha
		Rp.	346,026,500	200,000,000				
	1.18. Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan Industri Minuman Beralkohol Tradisional	output		5 unit usaha	6 unit usaha	7 unit usaha	8 unit usaha	9 unit usaha
		Rp.		70,000,000				
	1.19. Pengawasan dan Pembinaan Industri Air Minum Dalam Kemasan	output		7 unit usaha	8 unit usaha	9 unit usaha	10 unit usaha	11 unit usaha
		Rp.		250,000,000				
	1.20. Pengembangan Industri Pengolahan Kakao	output			2 unit usaha	2 unit usaha	2 unit usaha	2 unit usaha
		Rp.						
	1.21. Pengembangan Industri Pengolahan Buah	output			2 unit usaha	4 unit usaha	6 unit usaha	8 unit usaha
		Rp.						
	1.22. Partisipasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi dan Promosi	output	2 kali/ 2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event
		Rp.	155,009,300	130,000,000				
	1.23. Tim Analisis Rekomendasi Perizinan (Izin Prinsip, Izin Usaha Industri Primer & Izin Lingkungan)	output		5 rekomendasi	5 rekomendasi	5 rekomendasi	5 rekomendasi	5 rekomendasi
		Rp.		100,000,000				
	1.24. Diklat Peningkatan Kompetensi SDM Industri Bidang IKAHH	output			2 diklat	2 diklat	2 diklat	2 diklat
		Rp.						
	1.25. Kerjasama Penerapan dan Pengembangan Penguasaan IPTEK Industri Hilir Karet	output		3 unit usaha	4 unit usaha	5 unit usaha	6 unit usaha	7 unit usaha
		Rp.		200,000,000				
	1.26.a. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Industri Serat Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret)	output	7 hari, 20 orang		2 unit usaha	3 unit usaha	4 unit usaha	5 unit usaha
		Rp.	159,993,400					

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN						
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.26b. bantuan Peralatan Industri Pengolahan Serat Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret)	output	1 unit						
		Rp.	199,886,100						
	1.27. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Industri Kimia Dasar dan Kimia Hilir	output				8 unit usaha	10 unit usaha	12 unit usaha	14 unit usaha
		Rp.							
	1.28. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan	output				8 unit usaha	10 unit usaha	12 unit usaha	14 unit usaha
		Rp.							
	1.29. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	output				8 unit usaha	10 unit usaha	12 unit usaha	14 unit usaha
		Rp.							
	1.30. Pengembangan Industri Keramik	output				5 unit usaha	5 unit usaha	5 unit usaha	5 unit usaha
		Rp.							
	1.31. Pengembangan Industri Pengolahan Kopi	output				1 unit usaha	2 unit usaha	3 unit usaha	4 unit usaha
		Rp.							
	1.32. Pengembangan Industri Pengolahan Jagung	output				1 unit usaha	2 unit usaha	3 unit usaha	4 unit usaha
		Rp.							
	1.33. Pengembangan Industri Pengolahan Tapioka	output						1 unit usaha	2 unit usaha
		Rp.							
	1.34. Pengembangan Industri Pengolahan Nenas	output							1 unit usaha
		Rp.							
	1.35. Pengembangan Industri Pengolahan Mangrove	output			1 unit usaha	2 unit usaha	3 unit usaha	4 unit usaha	5 unit usaha
		Rp.			110,000,000				
1.36. Kajian Industri Pengolahan Kertas	output			1 naskah				1 naskah	
	Rp.			75,000,000					
1.37. Partisipasi Seminar, Pameran dan Pembinaan Produk OVOP	output			1 event, 1 komoditi	2 event, 2 komoditi	2 event, 2 komoditi	2 event, 2 komoditi	2 event, 2 komoditi	
	Rp.			80,000,000					
1.38. Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Produk Industri Pangan	output			10 sertifikat halal	20 sertifikat halal	25 sertifikat halal	30 sertifikat halal	35 sertifikat halal	
	Rp.			50,000,000					
Jumlah			2,719,102,250	3,660,000,000	4,160,000,000	4,992,000,000	5,990,400,000	7,188,480,000	

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pengembangan Industri Logam Mesin, elektronika dan aneka	1.1 Dukungan Pengembangan Alsintan Centre	output	3 kali, 30 orang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Rp.	251,615,600	260,000,000	270,000,000	280,000,000	325,000,000	350,000,000
	1.2. Rapat Teknis Bidang ILMEA Se-Kalbar dan Partisipasi pada Rakor	output	3 rakor	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi
		Rp.	129,172,600	165,000,000	170,000,000	175,000,000	180,000,000	190,000,000
	1.3 Pengembangan Industri Galangan Kapal	output	1 kali, 32 orang	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
		Rp.	80,153,000	100,000,000	120,000,000	140,000,000	160,000,000	200,000,000
	1.4. Dukungan Pengembangan Industri Berbahan Baku Lokal (Hasil Tambang)	output	-	1 FS	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
		Rp.	-	150,000,000	160,000,000	170,000,000	200,000,000	300,000,000
1.5. Pengembangan Industri Alat angkut (otomotif)	output	-	1 Unit usaha	1 Unit usaha	1 Unit usaha	1 Unit usaha	1 Unit usaha	
	Rp.	-	200,000,000	210,000,000	220,000,000	240,000,000	270,000,000	
1.6. Pengembangan Industri Kreatif Basis IT	output	1 kali, 20 orang	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	
	Rp.	128,281,500	100,000,000	150,000,000	170,000,000	180,000,000	190,000,000	
Jumlah		Rp.	589,222,700	975,000,000	1,080,000,000	1,155,000,000	1,285,000,000	1,500,000,000
Pengembangan IKM & Industri Kreatif	2.1 . Partisipasi Pameran Nasio-nal, Festifal Maulid dan Daerah	output	3 event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event
		Rp.	199,799,000	100,000,000	120,000,000	140,000,000	160,000,000	200,000,000
	2.2. Partisipasi Promosi & Pameran Produk Unggulan IKM di dalam dan luar negeri	output	1 event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event
		Rp.	109,555,250	200,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000
	2.3.Fasilitasi Forum Komunikasi OVOP Daerah	output	1 paket		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		Rp.	100,700,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	2.4. Partisipasi Pameran Aneka Produk Kerajinan Kalbar Pada HUT Gelar Kerajinan Dekranasda dan	output	2 event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event
		Rp.	97,653,000	100,000,000	120,000,000	140,000,000	160,000,000	200,000,000
	2.5. Dukungan Operasional UPL Provinsi (sosialisasi, pendamping-an, dan bantuan sertifikasi)	output	100 orang, 3 sentra	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM
		Rp.	113,514,600	120,000,000	140,000,000	160,000,000	200,000,000	220,000,000
	2.6. Pendampingan dan Evaluasi WUB di Desa Model pada 5 Kab/Kota (Kerjasama dengan PKK)	output	5 unit usaha,5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota
		Rp.	70,461,000	100,000,000	120,000,000	140,000,000	160,000,000	200,000,000
2.7. Pengolahan Mangrove Terpadu	output	20 orang	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	
	Rp.	123,618,000	150,000,000	170,000,000	190,000,000	210,000,000	250,000,000	
2.8. Dukungan dan Partisipasi Upakarti GKM dan Konvensi UPL	output	2 konvensi	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	
	Rp.	48,429,600	70,000,000	90,000,000	110,000,000	130,000,000	150,000,000	
2.9. Pengembangan IKM Daerah Perbatasan	output	2 kab/kota	5 sentra	5 sentra	5 sentra	5 sentra	5 sentra	
	Rp.	108,420,600	150,000,000	170,000,000	190,000,000	210,000,000	250,000,000	

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	2.10. Pengembangan Industri Kreatif Berbasis IT	output	-	20 orang	20 orang	20 orang	25 Orang	25 Orang
		Rp.	-	130,000,000	150,000,000	160,000,000	180,000,000	200,000,000
	2.11. Fasilitasi Penerapan HKI bagi IKM	output	-		20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM
		Rp.	-		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	2.12. Fasilitasi Pengembangan IKM Jewelry	output			1 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten
		Rp.			100,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
	2.13. Fasilitasi Pengembangan IKM Tenun Daerah	output			1 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten
		Rp.			100,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
Jumlah		Rp.	972,151,050	1,120,000,000	1,600,000,000	1,750,000,000	1,930,000,000	2,190,000,000
Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	1.1. Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	output	100 persen					
		Rp.	97,902,500	180,000,000	195,000,000	205,000,000	215,000,000	220,000,000
	1.2. Pengawasan Barang Beredar	output	100 persen					
		Rp.	144,236,500	195,000,000	205,000,000	215,000,000	220,000,000	225,000,000
	1.3. Pembinaan dan Pengawasan Kemetrolgian	output	100 persen					
		Rp.	69,928,250	125,000,000	150,000,000	155,000,000	165,000,000	180,000,000
Jumlah			312,067,250	500,000,000	550,000,000	575,000,000	600,000,000	625,000,000
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.1. Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG	output	7 kab/kota					
		Rp.	43,871,000	56,000,000	58,000,000	60,000,000	62,000,000	64,000,000
	2.2. Monitoring dan Pembinaan Pasar Tradisional	output	7 kab/kota					
		Rp.	49,380,500	100,000,000	115,000,000	120,000,000	138,000,000	160,000,000
	2.3. Penyediaan Griya Kerajinan Kalbar Dalam Rangka Perluasan	output	1 buah griya					
		Rp.	54,465,300	300,000,000	325,000,000	325,000,000	325,000,000	350,000,000
	2.4. Partisipasi Pada Pameran Produk Dalam Negeri	output	-					
		Rp.	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	350,000,000
	2.5. Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan	output	9 kab/kota					
		Rp.	363,860,750	450,000,000	467,000,000	470,000,000	475,000,000	550,000,000
	2.6. Partisipasi Pada Pertasikencana, Lingkungan Hidup dan Hari Pangan Sedunia	output	1 kali, 1 event					
		Rp.	63,121,500	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	66,000,000
	2.7. Monitoring Stok Perdagangan Antar Pulau	output	5 kab/kota					
		Rp.	58,253,150	100,000,000	105,000,000	110,000,000	130,000,000	140,000,000
2.8. Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang Dalam Pengawasan	output	5 kab/kota						
	Rp.	41,344,050	114,000,000	114,000,000	120,000,000	130,000,000	145,000,000	
2.9. Resi Gudang dan Pasar Lelang	output	-						
	Rp.	-	115,000,000	126,000,000	155,000,000	175,000,000	200,000,000	

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	2.10. Monitoring Perdagangan Gula	output	1 tim, 4 triwulan					
		Rp.	56,675,000	-	-	-	-	-
	2.11. Partisipasi pada Pameran Pekan raya Jakarta	output	1 kali, 1 event	-	-	-	-	-
		Rp.	143,632,250	-	-	-	-	-
	2.12. Partisipasi pada Pameran pangan Nusa	output	1 kali, 1 event	-	-	-	-	-
		Rp.	113,830,750	-	-	-	-	-
	Jumlah		988,434,250	1,600,000,000	1,675,000,000	1,725,000,000	1,800,000,000	2,025,000,000
Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri	1.1 Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	output	2 wilayah perbatasan	Peserta / Lokasi	Peserta / Lokasi	Peserta / Lokasi	Peserta / Lokasi	Peserta / Lokasi
				150 org / 3 lok	150 org / 3 lok	150 org / 3 lok	150 org / 3 lok	150 org / 3 lok
		Rp.	91,608,000	700,000,000	250,000,000	275,000,000	285,000,000	300,000,000
	1.2 Pemutakhiran Data Importir / Eksportir	output	1 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		Rp.	35,570,000	40,000,000	40,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
	1.3 Forum Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Kalbar	output	1 kali, 1 naskah	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl
		Rp.	60,084,000	200,000,000	200,000,000	230,000,000	264,500,000	304,175,000
	1.5 Penumbuhan dan pengembangan Trade Center kalbar	output	-	1 lokasi/1 Kajian	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi/1 unit
		Rp.	-	250,000,000	100,000,000	150,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
	1.6.. Forum kerjasama Sosekmalindo	output	1 kerjasama regional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Rp.	118,260,500	130,000,000.00	135,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
	1.7.. Forum kerjasama Sub Regional BIMP -EAGA	output	1 kerjasama regional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Rp.	76,272,500	80,000,000.00	80,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	90,000,000.00
	1.8.. Dukungan Pembahasan Border Trade Agreement (BTA)	output	1 pembahasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Rp.	148,023,250	120,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	
1.9. Pembinaan dan monev kebijakan Perdagangan luar Negeri	output	-	1 tahun/ 1dokumen	1 tahun/ 1dokumen	1 tahun/ 1dokumen	1 tahun/ 1dokumen	1 tahun/ 1dokumen	
	Rp.	-	250,000,000.00	275,000,000.00	305,000,000.00	345,000,000.00	355,000,000.00	
	Jumlah		529,818,250	1,770,000,000	1,205,000,000	1,355,000,000	2,789,500,000	2,859,175,000
Pengembangan Ekspor Daerah	2.1. Partisipasi pada PPE dan misi dagang luar negeri	output	2 kali/event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event
		Rp.	349,425,500	500,000,000	600,000,000	700,000,000	900,000,000	950,000,000
	2.2. Partisipasi pada PPED	output	2 kali/event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event
		Rp.	280,438,500	400,000,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000	650,000,000
	2.3 Peningkatan Informasi Ekspor	output	1 tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Rp.	92,928,000	90,000,000	95,000,000	95,000,000	100,000,000	100,000,000
	2.4 Penyusunan Profil & Pemeta-an	output	-	2 paket	1 paket	1 Buku Profil	1 Buku Profil	1 Buku Profil

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Komoditi dan Pelaku Ekspor	Rp.	-	450,000,000	270,000,000	275,000,000	285,000,000	300,000,000

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN						
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	2.5 Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah	output	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Rp.	-	175,000,000	180,000,000	185,000,000	185,000,000	190,000,000	
	2.6. Peningkatan Kemampuan eksportir Daerah	output	-	1 kegt	1 kegt	1 kegt	1 kegt	1 kegt	
		Rp.	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	
	2.7 Pengembangan, Penguatan, pembinaan dan Monitoring Pelayanan E-SKA dan API Online	output	1 event	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
		Rp.	30 eksportir	46,574,750	95,000,000	109,250,000	190,000,000	205,000,000	215,000,000
Jumlah			722,792,000	1,765,000,000	1,795,000,000	1,955,000,000	2,220,000,000	2,340,000,000	
Program Pengembangan Perencanaan Bidang Indag	Rapat Kerja Industri dan Perdagangan se Kalimantan Barat	output	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
		Rp.	1 naskah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Partisipasi Pada Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Kementerian Perindustrian RI	output	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		Rp.	145,669,800	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
	Partisipasi Pada Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Kementerian Perdagangan RI	output	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		Rp.	173,420,500	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
	Partisipasi Pada Musrenbang Kab/Kota, Provinsi Nasional	output	1 dokumen, 16 kali musrenbang	1 dokumen, 16 kali musrenbang	1 dokumen, 16 kali musrenbang	1 dokumen, 16 kali musrenbang	1 dokumen, 16 kali musrenbang	1 dokumen, 16 kali musrenbang	
		Rp.	129,123,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	
	In House Training Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Bidang Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	output	6 kegiatan, 150 orang	1 kegiatan, 25 orang	2 kegiatan, 50 orang	2 kegiatan, 50 orang	2 kegiatan, 50 orang	2 kegiatan, 50 orang	
		Rp.	57,794,000	15,000,000	40,000,000	40,000,000	46,000,000	52,900,000	
	Penyusunan data spasial bidang indag Kalbar	output	2 jenis data, 3 kab/kota	2 jenis data, 2 kab/kota	2 jenis data, 4 kab/kota	2 jenis data, 7 kab/kota	2 jenis data, 11 kab/kota	2 jenis data, 14 kab/kota	
		Rp.	87,126,000	100,000,000	115,000,000	150,000,000	175,000,000	201,250,000	
	Jumlah			864,414,500	665,000,000	735,000,000	790,000,000	831,000,000	879,150,000
	TOTAL JUMLAH INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN KEGIATAN UTAMA		Rp.	7,698,002,250	12,055,000,000	12,800,000,000	14,297,000,000	17,445,900,000	19,606,805,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
		Rp.	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,300,000	2,645,000	3,045,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	output	4 jenis jasa	4 jenis jasa	4 jenis jasa	4 jenis jasa	4 jenis jasa	4 jenis jasa	
		Rp.	246,000,000	250,000,000	309,465,000	355,885,000	409,270,000	470,660,500	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara	output	1 tahun	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
		Rp.	46,500,000	35,000,000	61,500,000	70,725,000	81,350,000	93,600,000	

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	output		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Rp.		10,000,000	10,000,000	13,225,000	15,210,000	17,500,000	2,625,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	output		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Rp.		4,500,000	5,000,000	5,960,000	6,854,000	7,885,000	9,070,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	output		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Rp.		189,200,000	210,000,000	250,217,000	287,750,000	330,912,500	380,550,000
Penyediaan Alat Tulis kantor	output		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Rp.		75,960,500	65,000,000	74,750,000	115,550,000	132,882,500	152,820,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	output		3 jenis	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Rp.		58,910,000	56,000,000	77,910,000	89,596,500	103,040,000	118,496,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	output		1 tahun, 520 buah/jenis	1 tahun, 535 buah/jenis	1 tahun, 545 buah/jenis	1 tahun, 550 buah/jenis	1 tahun, 555 buah/jenis	1 tahun, 555 buah/jenis
	Rp.		10,000,000	11,500,000	13,225,000	15,210,000	17,491,500	20,116,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	output		1 tahun, 1.175 buah/jenis	1 tahun, 1.185 buah/jenis	1 tahun, 1.190 buah/jenis	1 tahun, 2.000 buah/jenis	1 tahun, 2.000 buah/jenis	1 tahun, 2.020 buah/jenis
	Rp.		20,367,500	17,000,000	20,378,000	23,435,000	27,000,000	31,050,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	output		1 tahun, 264 eksemplar	1 tahun, 264 eksemplar	1 tahun, 264 eksemplar	1 tahun, 264 eksemplar	1 tahun, 264 eksemplar	1 tahun, 264 eksemplar
	Rp.		18,436,000	18,000,000	20,700,000	28,100,000	32,315,000	37,165,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	output		1 tahun, 1500 OK	1 tahun, 1500 OK	1 tahun, 1500 OK	1 tahun, 1500 OK	1 tahun, 1500 OK	1 tahun, 1500 OK
	Rp.		35,000,000	30,000,000	34,500,000	53,235,000	61,225,000	70,410,000
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	output		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Rp.		328,680,000	335,000,000	385,250,000	400,000,000	420,000,000	450,000,000
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran	output		12 bulan, 8 orang	12 bulan, 8 orang	12 bulan, 8 orang	12 bulan, 8 orang	12 bulan, 8 orang	12 bulan, 8 orang
	Rp.		111,840,000	140,000,000	126,330,000	145,279,500	167,100,000	192,165,000
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	output		12 bulan, 17 orang	12 bulan, 17 orang	12 bulan, 18 orang	12 bulan, 18 orang	12 bulan, 18 orang	12 bulan, 20 orang
	Rp.		92,400,000	105,000,000	120,750,000	140,530,000	161,609,500	185,855,000
Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	output		1 tahun	1 tahun, 25 kali	1 tahun, 25 kali	1 tahun, 27 kali	1 tahun, 30 kali	1 tahun, 32 kali
	Rp.		10,000,000	35,000,000	40,250,000	22,815,000	26,250,000	28,875,000
Penataan dan Pemeliharaan Arsip	output		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Rp.		10,840,000	50,000,000	57,500,000	66,125,000	19,775,000	22,745,000
Jumlah			1,270,134,000	1,374,000,000	1,613,910,000	1,838,600,000	2,018,251,000	2,269,247,500

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN						
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	output	1 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan			3 unit	1 unit		1 unit
		Rp.	289,500,000			900,000,000	300,000,000		300,000,000
	Pengadaan perlengkapan/ peralatan kantor	output	1 tahun, 64 unit	1 tahun, 65 unit	1 tahun, 70 unit	1 tahun, 75 unit	1 tahun, 80 unit	1 tahun, 80 unit	
		Rp.	173,300,000	140,000,000	154,000,000	177,100,000	275,000,000	300,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	output	1 tahun	1 tahun, 2 set	1 tahun, 2 set	1 tahun, 2 set	1 tahun, 2 set	1 tahun, 2 set	
		Rp.	100,800,000	115,000,000	132,250,000	155,000,000	178,250,000	204,987,500	
	Rehabilitasi Pagar Kantor	output	-	1 paket	-	-	-	-	
		Rp.	-	391,800,000	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Gudang	output	-					1 paket	
		Rp.	-		-	-	-	500,000,000	
	Pengadaan bak air/menara air	output	-	1 paket					
		Rp.	-	150,000,000	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Gedung tempat ibadah	output	-					1 paket	
		Rp.	-			-	-	300,000,000	
	Pengadaan Meubelair	output	20 buah	6 buah	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
		Rp.	27,500,000	11,000,000	25,000,000	30,000,000	34,500,000	40,000,000	
	Pembangunan Saluran Air	output	-				1 PAKET		
		Rp.	-		-	-	500,000,000	-	
	Pembangunan Plank Nama Kantor	output	-				1 PAKET		
		Rp.	-		-	-	200,000,000	-	
	Rehabilitasi gedung kantor	output	-	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	
		Rp.	-	151,000,000		700,000,000	1,000,000,000	750,000,000	
	Peningkatan Instalasi Listrik	output	-		1 PAKET				
		Rp.	-	-	300,000,000	-	-	-	
	Rehabilitasi Gedung Pertemuan/Aula	output	-			1 PAKET	1 PAKET		
		Rp.	-	-	-	1,000,000,000	500,000,000	-	
	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga	output	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
		Rp.	-	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
		Rp.	105,550,000	125,000,000	143,750,000	155,000,000	175,000,000	201,250,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/ Kipas Angin	output	1 tahun, 22 unit	1 tahun, 23 unit	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
		Rp.	5,500,000	8,000,000	9,200,000	7,500,000	8,625,000	9,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	output	1 tahun, 50 buah	1 tahun, 132 buah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
		Rp.	16,950,000	18,000,000	20,700,000	22,500,000	25,875,000	30,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	output		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
		Rp.		100,000,000	115,000,000	132,250,000	152,087,500	174,900,625	

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	output Rp.	1 tahun, 7 unit 7,500,000	1 tahun, 9 unit 8,500,000	1 tahun 9,775,000	1 tahun 11,500,000	1 tahun 13,225,000	1 tahun 14,500,000
	Pemeliharaan sarana & prasarana Sistem Informasi	output Rp.	1 tahun 75,000,000	1 tahun 75,000,000	1 tahun 86,250,000	1 tahun 99,187,500	1 tahun 114,065,625	1 tahun 143,418,500
	Pemeliharaan taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan	output Rp.		2 jenis 3,000,000				
	Rehabilitasi Garasi/ Tempat Parkir Kendaraan	output Rp.	1 paket 17,307,500	- -	- -	- -	- -	- -
	Jumlah		818,907,500	1,313,300,000	1,912,925,000	2,807,037,500	3,193,628,125	2,985,556,625
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan perlengkapannya	output Rp.	86 orang, 86 buah 38,700,000	95 orang, 1 stel 45,000,000		94 orang, 3 stel 150,000,000	- -	98 orang, 3 stel 175,000,000
	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	output Rp.	86 orang, 86 buah 10,750,000	87 orang, 2 stel 66,000,000		94 orang, 1 stel 45,000,000	- -	98 orang, 1 stel 55,000,000
	Jumlah		49,450,000	111,000,000	-	195,000,000	-	230,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan	output Rp.	1 tahun, 30 orang 200,000,000	1 tahun, 35 orang 200,000,000	1 tahun, 40 orang 230,000,000	1 tahun, 45 orang 260,000,000	1 tahun, 50 orang 300,000,000	1 tahun, 55 orang 330,000,000
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	output Rp.	1 tahun, 25 orang 7,500,000	1 tahun, 25 orang 7,500,000	1 tahun, 25 orang 10,000,000	1 tahun, 25 orang 11,500,000	1 tahun, 25 orang 13,225,000	1 tahun, 28 orang 15,210,000
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	output Rp.	12 bulan, 4 jab. Fungsional 80,641,500	12 bulan, 4 jab. Fungsional 160,000,000	12 bulan, 4 jab. Fungsional 160,000,000	12 bulan, 4 jab. Fungsional 160,000,000	12 bulan, 4 jab. Fungsional 160,000,000	12 bulan, 4 jab. Fungsional 170,000,000
	Pembinaan Jasmani dan Rohani	output Rp.	12 bulan, 4 keg 92,590,000	12 bulan, 4 keg 57,000,000	12 bulan, 4 keg 59,850,000	12 bulan, 4 keg 107,200,000	12 bulan, 4 keg 112,560,000	12 bulan, 4 keg 118,188,000
	Penetapan Kinerja	output Rp.	1 dokumen 17,595,500	1 dokumen 25,000,000	1 dokumen 25,000,000	1 dokumen 26,770,000	1 dokumen 30,785,500	1 dokumen 35,400,000
	Standar Operasional Prosedur (SOP)	output Rp.	1 naskah 46,797,000		1 dokumen 62,000,000	1 dokumen 71,300,000	1 dokumen 81,995,000	1 dokumen 95,000,000
	Jumlah		445,124,000	449,500,000	546,850,000	636,770,000	698,565,500	763,798,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Penyusunan Laporan Keuangan	output Rp.	1 tahun, 4 kali 26,761,000	1 tahun, 4 jenis laporan 74,000,000	1 tahun, 4 jenis laporan 40,000,000	1 tahun, 4 jenis laporan 40,000,000	1 tahun, 4 jenis laporan 45,630,000	1 tahun, 4 jenis laporan 52,474,500
	Penyusunan LAKIP	output Rp.	1 naskah 18,845,500	1 dokumen 35,000,000	1 dokumen 40,250,000	1 dokumen 46,287,500	1 dokumen 32,860,000	1 dokumen 37,780,000
	Penyusunan RENJA SKPD	output Rp.	1 dokumen 17,920,000	1 dokumen 30,000,000	1 dokumen 23,690,000	1 dokumen 30,000,000	1 dokumen 30,000,000	1 dokumen 35,000,000
	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	output Rp.	2 dokumen 25,906,500	2 dokumen 30,000,000	2 dokumen 34,500,000	2 dokumen 40,000,000	2 dokumen 40,000,000	2 dokumen 45,000,000

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	output	12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian	12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian	12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian	12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian	12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian	12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian
		Rp.	135,995,000	141,000,000	156,395,000	160,000,000	160,000,000	170,000,000
	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	output	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
		Rp.	29,576,500	35,000,000	40,250,000	35,000,000	35,000,000	40,250,000
	Penyusunan RENSTRA	output	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen
		Rp.	29,823,500	-	35,000,000	-	-	45,000,000
	Jumlah		284,828,000	345,000,000	370,085,000	351,287,500	343,490,000	425,504,500
Program Peningkatan Pengelolaan Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	output	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Rp.	83,757,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
			83,757,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
TOTAL JUMLAH INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN KEGIATAN RUTIN		Rp.	2,952,200,500	3,682,800,000	4,533,770,000	5,918,695,000	6,343,934,625	6,764,106,625
TOTAL JUMLAH INDIKASI KEBUTUHAN		Rp.	10,650,202,750	15,737,800,000	17,333,770,000	20,215,695,000	23,789,834,625	26,370,911,625

MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018

Lampiran II

Bidang/UPT : UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PONTIANAK

PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	LOKASI
2	3	4	5	6	7	8	9	
UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PONTIANAK		2,500,000,000	3,536,445,000	3,890,089,500	4,243,734,000	4,597,378,500	4,951,023,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (UNIT PELAYANAN METROLOGI PONTIANAK)	Terwujudnya Tertib Ukur di Tengah Masyarakat	1,408,791,550	2,329,619,000	2,562,580,900	2,795,542,800	3,028,504,700	3,261,466,600	
Verifikasi Alat-Alat Standar	Tertelusurnya peralatan standar yang dimiliki	53,407,900	64,679,000	71,146,900	77,614,800	84,082,700	90,550,600	IBUKOTA PROVINSI
Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP	Terlaksananya Kegiatan Tera/Tera Ulang alat UTTP di Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Kubu Raya, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang,	1,200,809,250	2,090,473,000	2,299,520,300	2,508,567,600	2,717,614,900	2,926,662,200	IBUKOTA PROVINSI
Survailen	Terjaminnya kemampuan Laboratorium-laboratorium yang dimiliki oleh UP. Kemetrolgian Pontianak	56,613,000	85,067,000	93,573,700	102,080,400	110,587,100	119,093,800	IBUKOTA PROVINSI
Uji Banding Kalibrasi	Terjaganya kualitas laboratorium kalibrasi	38,688,900	16,287,000	17,915,700	19,544,400	21,173,100	22,801,800	IBUKOTA PROVINSI
Penyusunan Data UTTP di 11 kabupaten / Kota	Tersedianya 1 Dokumen Data UTTP	4,556,250						
Pengelolaan Laboratorium	Terjaganya Kemampuan Laboratorium	54,716,250	54,716,250	60,187,875	65,659,500	71,131,125	76,602,750	IBUKOTA PROVINSI
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya perlengkapan untuk pelayanan administrasi perkantoran	595,475,900	639,418,000	703,359,800	767,301,600	831,243,400	895,185,200	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pengiriman surat menyurat	1,628,000	1,790,000	1,969,000	2,148,000	2,327,000	2,506,000	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111,552,000	128,647,000	141,511,700	154,376,400	167,241,100	180,105,800	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlindungnya aset oleh asuransi	33,400,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1,822,000	2,090,000	2,299,000	2,508,000	2,717,000	2,926,000	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Perlengkapan administrasi keuangan	1,542,000	1,698,000	1,867,800	2,037,600	2,207,400	2,377,200	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaminnya kebersihan kantor	52,150,000	75,000,000	82,500,000	90,000,000	97,500,000	105,000,000	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	27,809,400	3,150,000	3,465,000	3,780,000	4,095,000	4,410,000	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	36,926,000	39,600,000	43,560,000	47,520,000	51,480,000	55,440,000	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	7,128,000	784,000	862,400	940,800	1,019,200	1,097,600	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,400,000	3,339,000	3,672,900	4,006,800	4,340,700	4,674,600	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat	14,200,000	12,100,000	13,310,000	14,520,000	15,730,000	16,940,000	IBUKOTA PROVINSI
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	156,238,500	112,391,000	123,630,100	134,869,200	146,108,300	157,347,400	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan	Terjaminnya keamanan lingkungan kantor	83,880,000	77,972,000	85,769,200	93,566,400	101,363,600	109,160,800	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan dan barang	63,600,000	83,952,000	92,347,200	100,742,400	109,137,600	117,532,800	IBUKOTA PROVINSI
Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terwujudnya sosialisasi kegiatan tera/tera ulang	1,200,000	11,495,000	12,644,500	13,794,000	14,943,500	16,093,000	IBUKOTA PROVINSI
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	306,729,500	450,627,900	495,690,690	540,753,480	585,816,270	630,879,060	
Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Sarana dan prasarana	195,550,000						
Pengadaan Perlengkapan /Peralatan kantor	Tersedianya Mesin Tik	5,000,000						
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik		150,000,000	165,000,000	180,000,000	195,000,000	210,000,000	IBUKOTA PROVINSI
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	75,629,500	69,029,400	75,932,340	82,835,280	89,738,220	96,641,160	IBUKOTA PROVINSI

PROGRAM DAN KEGIATAN 2	CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3	2013	2014	2015	2016	2017	2018	LOKASI 9
			4	5	6	7	8	
Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC dengan baik	3,250,000	7,865,000	8,651,500	9,438,000	10,224,500	11,011,000	IBUKOTA PROVINSI
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor dengan baik	4,500,000	13,733,500	15,106,850	16,480,200	17,853,550	19,226,900	IBUKOTA PROVINSI
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terpenuhinya peralatan standar yang dimiliki	8,000,000						
			200,000,000	220,000,000	240,000,000	260,000,000	280,000,000	IBUKOTA PROVINSI
Pengadaan Mebelair	Tersedianya peti peralatan standar dan peti register	6,000,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000	IBUKOTA PROVINSI
Pemeliharaan Perlengkapan /Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Kontruksi Khusus	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja	8,800,000						
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur	29,900,000	86,572,000	95,229,200	103,886,400	112,543,600	121,200,800	
Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas sebanyak 2 jenis untuk 26 orang	23,400,000	80,522,000	88,574,200	96,626,400	104,678,600	112,730,800	IBUKOTA PROVINSI
Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian KORPRI untuk 26 orang	6,500,000	6,050,000	6,655,000	7,260,000	7,865,000	8,470,000	IBUKOTA PROVINSI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	99,915,500	86,572,000	95,229,200	103,886,400	112,543,600	121,200,800	
Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur	71,500,000	80,522,000	88,574,200	96,626,400	104,678,600	112,730,800	IBUKOTA PROVINSI
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur	13,500,000	6,050,000	6,655,000	7,260,000	7,865,000	8,470,000	IBUKOTA PROVINSI
Analisis Jabatan	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur	5,027,500						
Penetapan Kinerja	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur	4,860,500						
Standar Operasional Prosedur	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur	5,027,500						
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59,187,550	30,207,000	33,227,700	36,248,400	39,269,100	42,289,800	
Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	9,421,000	3,878,000	4,265,800	4,653,600	5,041,400	5,429,200	IBUKOTA PROVINSI
Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP	17,885,000	9,329,000	10,261,900	11,194,800	12,127,700	13,060,600	IBUKOTA PROVINSI
Penyusunan RENJA SKPD	Tesedianya RENJA SKPD	5,573,000	5,745,000	6,319,500	6,894,000	7,468,500	8,043,000	IBUKOTA PROVINSI
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD	16,256,250	11,254,000	12,379,400	13,504,800	14,630,200	15,755,600	IBUKOTA PROVINSI
		10,052,300						

MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018

Lampiran III

Bidang/UPT : UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN SINGKAWANG

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN						
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.1. Pelayanan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	output	1 tahun	8000	6000	6000	6000	6000	
		Rp.		225,483,500	304,227,000	304,227,000	305,000,000	310,000,000	315,000,000
	1.2. Verifikasi Alat Standart	output	1 tahun						
		Rp.		17,086,000	21,759,000	21,759,000	21,759,000	21,759,000	25,000,000
	1.3. Survelen	output							
		Rp.			21,142,000	21,142,000	21,142,000	21,142,000	25,000,000
	1.4. Uji Banding Kalibrasi	output							
		Rp.			10,195,000	13,253,500	13,253,500	13,253,500	15,000,000
	1.5. Pelayanan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)	output							
		Rp.			17,943,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
		Jumlah	Rp.	242,569,500	375,266,000	81,404,500	386,154,500	391,154,500	405,000,000
	2. Administrasi Kantor dll	2.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	output	1 tahun					
			Rp.		2,460,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		2.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	output	1 tahun					
			Rp.		22,800,000	22,800,000	22,800,000	22,800,000	22,800,000
2.3. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		output	1 tahun						
		Rp.		3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
2.4. Penyediaan administrasi keuangan		output	Tersedia						
		Rp.		540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000
2.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		output	1 tahun						
		Rp.		15,000,000	15,000,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000
2.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor (A T K)		output	1 tahun						
		Rp.		8,655,000	11,098,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000	13,095,000
2.7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		output	1 tahun						
		Rp.		12,570,000	12,570,000	12,570,000	12,570,000	12,570,000	12,570,000
2.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		output	1 tahun						
	Rp.		1,200,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
2.9. Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	output	1 tahun							
	Rp.		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
2.10. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undan	output	4 expl dan 20 buku							
	Rp.		2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
2.11. Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	output	1 tahun							
	Rp.		6,900,000	7,680,000	7,680,000	7,680,000	7,680,000	7,680,000	
2.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Dae	output	1 tahun							
	Rp.		144,773,000	144,773,000	144,773,000	145,000,000	150,000,000	150,000,000	
2.13. Pengadaan Jasa Pendukung Kantor	output	4 orang							
	Rp.		55,920,000	55,920,000	55,920,000	55,920,000	55,920,000	55,920,000	
2.14. Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	output	1 tahun							
	Rp.		44,400,000	44,400,000	44,400,000	44,400,000	44,400,000	44,400,000	
2.15. Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	output	1 tahun							

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN RUPIAH	TARGET KINERJA TAHUN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Rp.	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	2.16 Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedunbg Kantor/Bangunan K	output	1 tahun					
		Rp.	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Jumlah	Rp.	333,618,000	316,181,000	343,478,000	343,705,000	348,705,000	348,705,000
3 Sarana/Prasarana Aparatur	3.1 Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	output						
		Rp.		2,250,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
	3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	output						
		Rp.		55,500,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
	3.3 Pemeliharaan Mobil Jabatan,Mobil Dinas,Kendaraan Operas	output	4 motor,2 mobil					
		Rp.	37,960,000	46,600,000	49,800,000	49,800,000	49,800,000	49,800,000
	3.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	output	7 unit					
		Rp.	1,750,000	1,750,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	3.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan peralatan kantor	output	1 tahun					
		Rp.	3,350,000					
	3.6 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	output						
		Rp.		3,650,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	3.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	output	1 tahun					
		Rp.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	3.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala generator	output	1 jenis					
		Rp.	200,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	Jumlah	Rp.	43,510,000	55,000,000	127,550,000	127,550,000	127,550,000	127,550,000
4.Meningkatkan kapasitas SDM	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	output	1 tahun					
		Rp.	22,500,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,000
	4.2 Sosialisasi Bimtek dan Workshop	output	1 tahun					
		Rp.	25,000,000	25,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Jumlah	Rp.	47,500,000	55,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
5.Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian & Keuangan	5.1 Penyusunan Laporan Keuangan	output	1 tahun					
		Rp.	9,711,000	9,711,000	9,711,000	9,711,000	9,711,000	9,711,000
	5.2 Penyusunan LAKIP	output	1 dokumen					
		Rp.	7,322,000	7,322,000	7,322,000	7,322,000	7,322,000	7,322,000
	Penyusunan RENJA- SKPD	output	1 dokumen					
		Rp.	6,516,500	7,229,000	7,229,000	7,229,000	7,229,000	7,229,000
	Penyusunan RKA dan DPA-SKPD	output	4 dokumen					
		Rp.	9,253,000	9,253,000	9,253,000	9,253,000	9,253,000	9,253,000
	Jumlah	output	32,802,500	33,515,000	33,515,000	23,804,000	33,515,000	33,515,000
	Total	Rp.	700,000,000	834,962,000	640,947,500	941,213,500	965,924,500	984,770,000

MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018

Lampiran V

Bidang / UPT : UNIT PELATIHAN IKM KALBAR

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KERJA TAHUN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	1.1 Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE	output Rp.	100 persen 130,000,000.00	2 Angkatan 280,000,000.00	2 Angkatan 290,000,000.00	2 Angkatan 300,000,000.00	2 Angkatan 310,000,000.00	2 Angkatan 320,000,000.00
	1.2 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro	output Rp.	- -	2 Angkatan 150,000,000.00	2 Angkatan 165,000,000.00	2 Angkatan 180,000,000.00	2 Angkatan 195,000,000.00	2 Angkatan 210,000,000.00
	1.3 Pelatihan Tehnis Pembuatan Aneka Produk Berbasis Karet Alam Skala Industri Kecil Rumah Tangga	output Rp.	- -	2 Angkatan Rp 170,000,000.00	2 Angkatan 180,000,000.00	2 Angkatan 200,000,000.00	2 Angkatan 220,000,000.00	2 Angkatan 230,000,000.00
	1.4 Pelatihan Tehnis Pembuatan Aneka Produk Berbasis Kelapa Sawit Skala Industri Rumah Tangga	output Rp.	- -	2 Angkatan 170,000,000.00	2 Angkatan 180,000,000.00	2 Angkatan 200,000,000.00	2 Angkatan 220,000,000.00	2 Angkatan 230,000,000.00
	1.5 Pelatihan Tehnis Pengembangan Produk Kerajinan Berbasis Aneka Anyaman dari serat Alam, Bambu, Rotan dan Keladi Air.	output Rp.	- -	2 Angkatan 145,000,000.00	2 Angkatan 150,000,000.00	2 Angkatan 165,000,000.00	3 Angkatan 180,000,000.00	3 Angkatan 200,000,000.00
	1.6 Pelatihan Tehnis Pengolahan Aneka Hasil Laut	output Rp.	- -	1 Angkatan Rp 60,000,000.00	1 Angkatan 65,000,000.00	1 Angkatan 70,000,000.00	1 Angkatan 75,000,000.00	1 Angkatan 80,000,000.00
	1.7 Pelatihan Tehnis Pengembangan Tenun Ikat dan tenun Songket	output Rp.	20 orang 64,090,000.00	1 Angkatan 80,000,000.00	1 Angkatan 88,000,000.00	1 Angkatan 97,000,000.00	1 Angkatan 110,000,000.00	1 Angkatan 125,000,000.00
	1.8 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Konveksi, Fashion, Bordir, Sulaman dan Rajut.	output Rp.	-- -	1 Angkatan 60,000,000.00	1 Angkatan 65,000,000.00	1 Angkatan 70,000,000.00	1 Angkatan 75,000,000.00	1 Angkatan 80,000,000.00
	1.9 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Kerajinan Berbasis Kayu	output Rp.	- -	1 Angkatan Rp 65,000,000.00	1 Angkatan 72,500,000.00	1 Angkatan 80,000,000.00	1 Angkatan 87,000,000.00	1 Angkatan 95,500,000.00
	1.10 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Kerajinan Berbasis Kulit Kayu dan Daur Ulang Limbah	output Rp.	- -	1 Angkatan Rp 55,000,000.00	1 Angkatan 65,000,000.00	1 Angkatan 70,000,000.00	1 Angkatan 75,000,000.00	1 Angkatan 85,000,000.00
	1.11 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Kerajinan Asesoris, Perhiasan Perak, Batu Aji dan	output Rp.	- -	1 Angkatan Rp 65,000,000.00	1 Angkatan 72,500,000.00	1 Angkatan 80,000,000.00	1 Angkatan 88,000,000.00	1 Angkatan 94,500,000.00
	1.12 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Kerajinan Keramik Hias	output Rp.	- -	1 Angkatan Rp 75,000,000.00		1 Angkatan 125,000,000.00		
	1.13 Pelatihan Tehnis Pembuatan Aneka Produk ALSINTAN dan Pengembangan Produk Alat Angkut Bermesin Roda 4	output Rp.	100 persen Rp 144,800,000.00	1 Angkatan Rp 150,000,000.00		1 Angkatan Rp 150,000,000.00		1 Angkatan Rp 150,000,000.00
	1.14 Pelatihan Tehnis Peningkatan Mutu produk IKM Pangan	output Rp.	- -	1 Angkatan Rp 65,000,000.00	1 Angkatan Rp 72,500,000.00	1 Angkatan Rp 80,000,000.00	1 Angkatan Rp 87,500,000.00	1 Angkatan Rp 95,000,000.00
	1.15 Pelatihan Tehnis Pembuatan Pakan Ternak/ Ikan	output Rp.	- -	1 Angkatan Rp 80,000,000.00		1 Angkatan Rp 88,000,000.00	1 Angkatan Rp 95,000,000.00	1 Angkatan Rp 97,000,000.00
	1.16 Bimbingan dan Pendampingan Pasca Pelatihan	output Rp.	100 persen Rp 15,000,000.00	25 unit usaha Rp 40,000,000.00	25 unit usaha Rp 40,000,000.00	25 unit usaha Rp 40,000,000.00	25 unit usaha Rp 40,000,000.00	25 unit usaha Rp 40,000,000.00
	1.17 Bimbingan dan Penyuluhan Kesentra Kerajinan	output Rp.	8 kab/kota Rp 45,830,000.00	8 Sentra Rp 65,000,000.00	8 Sentra Rp 72,000,000.00	8 Sentra Rp 80,000,000.00	8 Sentra Rp 88,000,000.00	8 Sentra Rp 95,000,000.00
	1.18 Monitoring Dan Evaluasi Griya Kerajinan Kalbar Di Luar Daerah	output Rp.	1 lokasi Rp 29,310,000.00	2 Lokasi Rp 52,500,000.00	2 Lokasi Rp 57,000,000.00	2 Lokasi Rp 62,000,000.00	2 Lokasi Rp 70,000,000.00	2 Lokasi Rp 78,500,000.00

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KERJA TAHUN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.19 Pelayanan Klinik Desain Merek dan Kemasan	output Rp.	4 kab/kota Rp 45,700,000.00	1 Paket Rp 50,000,000.00	1 Paket Rp 55,000,000.00	1 Paket Rp 60,000,000.00	1 Paket Rp 65,000,000.00	1 Paket Rp 70,000,000.00
	1.20 Temu Usaha Pelaku IKM	output Rp.	100 persen Rp 21,400,000.00	1 Paket Rp 30,000,000.00	1 Paket Rp 35,000,000.00	1 Paket Rp 40,000,000.00	1 Paket Rp 45,000,000.00	1 Paket Rp 50,000,000.00
	1.21 Partisipasi pada Pameran Dalam Daerah, Nasional dan Dan Luar Negeri	output Rp.	4 event Rp 253,810,000.00	5 Event Rp 350,000,000.00	5 Event Rp 400,000,000.00	5 Event Rp 475,000,000.00	5 Event Rp 575,000,000.00	5 Event Rp 700,000,000.00
	1.22 Pengembangan Aneka Kerajinan Batik Motif Khas Kalbar	output Rp.	- -	1 Paket Rp 80,000,000.00	1 Paket Rp 90,000,000.00	1 Paket Rp 100,000,000.00	1 Paket Rp 110,000,000.00	1 Paket Rp 120,000,000.00
	1.23 Partisipasi Pada Kegiatan Rakor Penyusunan Program Pengembangan IKM Tingkat Nasional, Regional / Wilayah	output Rp.	2 lokasi Rp 27,250,000.00	3 lokasi Rp 35,000,000.00	3 lokasi Rp 45,000,000.00	3 lokasi Rp 60,000,000.00	3 lokasi Rp 75,000,000.00	3 lokasi Rp 85,000,000.00
	1.24 Studi Teknologi Pengembangan IKM dan Widyaloka Pengelolaan UPT	output Rp.	2 Lokasi Rp 70,021,400.00	4 Lokasi Rp 100,000,000.00	4 Lokasi Rp 110,000,000.00	4 Lokasi Rp 120,000,000.00	4 Lokasi Rp 130,000,000.00	4 Lokasi Rp 140,000,000.00
	1.25 Fasilitasi Pengelolaan Griya Kerajinan Kal - bar	output Rp.	1 tahun Rp 171,242,000.00	1 Paket Rp 200,000,000.00	1 Paket Rp 200,000,000.00	1 Paket Rp 200,000,000.00	1 Paket Rp 200,000,000.00	1 Paket Rp 200,000,000.00
	1.26 Rekrutmen Peserta Pelatihan CEFE	output Rp.	100 persen Rp 9,000,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.27 bimbingan Teknis Penerapan GMP bagi IKM Pangan	output Rp.	100 persen Rp 50,000,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.28 Tes market (Uji Pasar) Produk IKM pasca pelatihan	output Rp.	1 event Rp 39,138,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.29 Evaluasi Pembinaan Desa Model untuk daerah pesisir pedalaman, perbatasan dan perkotaan kerjasama dengan PKK Prov. Kalbar	output Rp.	100 persen Rp 26,300,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.30 Pelatihan teknis pengembangan anyaman rajut dan bordir bagi perajin IKM kerjasama denganPKK Prov.	output Rp.	100 persen Rp 49,300,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.31 Study teknologi Pengembangan IKM berbasis kelapa sawit	output Rp.	1 lokasi Rp 32,174,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.32 Pelatihan Teknis Aneka Produk Anyaman Daun dan Pelepah Kelapa Sawit	output Rp.	100 persen Rp 73,800,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.33 Pelatihan teknis diversifikasi produk kerajinan rotan/ bambu kerjasama dengan Dekranasda Prov. Kalbar	output Rp.	100 persen Rp 79,000,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.34 Pengiriman peserta diklat tehnik/ magang pengembangan produk dan desain kerjasama dengan Dekranasda Prov. Kalbar	output Rp.	2 orang Rp 8,120,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.35 Pengembangan Aneka Kerajinan khas Kalbar	output Rp.	1 lokasi Rp 64,550,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
		Jumlah	1,449,835,400.00	2,672,500,000.00	2,569,500,000.00	3,192,000,000.00	3,215,500,000.00	3,670,500,000.00

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KERJA TAHUN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
2. Program Pelayanan Administrasi	1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	output Rp.	1 Paket Rp 50,000,000.00	1 Paket Rp 55,000,000.00	1 Paket Rp 63,000,000.00	1 Paket Rp 70,000,000.00	1 Paket Rp 77,000,000.00	1 Paket Rp 85,000,000.00
	1.2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	output Rp.	1 unit Rp 1,000,000.00	1 unit Rp 1,200,000.00	1 unit Rp 1,350,000.00	1 unit Rp 1,500,000.00	1 unit Rp 1,650,000.00	1 unit Rp 1,800,000.00
	1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	output Rp.	400 materai dan 2 buku cek Rp 2,000,000.00	600 Buah Rp 2,500,000.00	600 Buah Rp 2,750,000.00	600 Buah Rp 3,250,000.00	600 Buah Rp 4,000,000.00	600 Buah Rp 4,500,000.00
	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	output Rp.	1 Paket Rp 29,450,000.00	1 Paket Rp 35,000,000.00	1 Paket Rp 37,500,000.00	1 Paket Rp 40,000,000.00	1 Paket Rp 42,500,000.00	1 Paket Rp 45,000,000.00
	1.5 Penyediaan Alat tulis Kantor	output Rp.	34 jenis ATK Rp 20,000,000.00	1 Paket Rp 30,000,000.00	1 Paket Rp 40,000,000.00	1 Paket Rp 50,000,000.00	1 Paket Rp 60,000,000.00	1 Paket Rp 70,000,000.00
	1.6 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	output Rp.	12 jenis cetakan dan 40000 lbr fc Rp 15,250,000.00	1 Paket Rp 20,000,000.00	1 Paket Rp 25,000,000.00	1 Paket Rp 30,000,000.00	1 Paket Rp 35,000,000.00	1 Paket Rp 40,000,000.00
	1.7 Penyediaan Komponen Instalansi listrik penerangan bangunan kantor	output Rp.	8 jenis alat listrik Rp 1,500,000.00	1 Paket Rp 2,000,000.00	1 Paket Rp 2,500,000.00	1 Paket Rp 3,000,000.00	1 Paket Rp 3,500,000.00	1 Paket Rp 4,000,000.00
	1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	output Rp.	3 Jenis Rp 2,640,000.00	3 Jenis Rp 1,500,000.00	3 Jenis Rp 1,500,000.00	3 Jenis Rp 1,500,000.00	3 Jenis Rp 1,500,000.00	3 Jenis Rp 1,500,000.00
	1.9 Penyediaan makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	output Rp.	290 org Rp 6,100,000.00	1 Paket Rp 7,500,000.00	1 Paket Rp 8,500,000.00	1 Paket Rp 10,000,000.00	1 Paket Rp 11,500,000.00	1 Paket Rp 12,500,000.00
	1.10 Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	output Rp.	2 jenis perjalanan dinas Rp 68,357,100.00	2 Paket Rp 100,000,000.00	2 Paket Rp 130,000,000.00	2 Paket Rp 158,000,000.00	2 Paket Rp 180,000,000.00	2 Paket Rp 232,000,000.00
1.11 Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran	output Rp.	11 orang Rp 153,780,000.00	7 orang Rp 200,000,000.00	7 orang Rp 220,000,000.00	7 orang Rp 275,000,000.00	7 orang Rp 325,000,000.00	7 orang Rp 380,000,000.00	
1.12 Penyediaan jasa Penata usahaan Keuangan dan Barang	output Rp.	12 bulan Rp 53,400,000.00	1 Paket Rp 60,000,000.00	1 Paket Rp 65,000,000.00	1 Paket Rp 70,000,000.00	1 Paket Rp 75,000,000.00	1 Paket Rp 80,000,000.00	
1.13 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	output Rp.	1 gedung, 1 unit kendaraan roda 4 Rp 9,000,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	
		Jumlah	412,477,100.00	514,700,000.00	597,100,000.00	712,250,000.00	816,650,000.00	956,300,000.00
3. Program Peningkatan Sarana	1.1 Pengadaan Kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	output Rp.	3 buah motor Rp 45,450,000.00	- -	- -	- -	1 unit roda 4 Rp 215,000,000.00	3 unit roda 2 Rp 60,000,000.00
	1.2 Pengadaan AC / Kipas Angin	output Rp.	1 unit AC Rp 5,000,000.00	2 unit AC 2 unit Kipas Rp 15,000,000.00	1 unit AC 2 unit kipas Rp 10,000,000.00	1 unit AC 1 unit kipas Rp 5,000,000.00		
	1.3 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	output Rp.	6 Paket Rp 49,450,000.00	6 Paket Rp 60,000,000.00	6 Paket Rp 60,000,000.00	6 Paket Rp 60,000,000.00	6 Paket Rp 60,000,000.00	6 Paket Rp 60,000,000.00
	1.4 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	output Rp.	1 tahun Rp 8,000,000.00	1 Paket Rp 4,000,000.00	1 Paket Rp 4,000,000.00	1 Paket Rp 4,000,000.00	1 Paket Rp 4,000,000.00	1 Paket Rp 4,000,000.00
	1.5 Pengadaan / Peningkatan Instalansi Listrik / Telepon	output Rp.	- -	1 Paket Rp 20,000,000.00	1 Paket Rp 30,000,000.00	1 Paket Rp 40,000,000.00	1 Paket Rp 50,000,000.00	1 Paket Rp 60,000,000.00

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KERJA TAHUN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.6 Pengadaan sarana / prasarana Studio dan Komunikasi	output Rp.	- -		1 Paket Rp 20,000,000.00		1 Paket Rp 30,000,000.00	
	1.7 Pengadaan sarana / prasarana pendukung gedung kantor	output Rp.	50 cm2 canopy 24450000		1 Paket Rp 20,000,000.00	1 Paket Rp 35,000,000.00	1 Paket Rp 45,000,000.00	
	1.8 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	output Rp.	1 jenis perawatan Rp 5,000,000.00	1 Paket Rp 30,000,000.00	1 Paket Rp 40,000,000.00	1 Paket Rp 50,000,000.00	1 Paket Rp 60,000,000.00	1 Paket Rp 70,000,000.00
	1.9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	output Rp.	1 unit kendaraan roda 4 Rp 17,450,000.00	1 Paket Rp 15,000,000.00	1 Paket Rp 15,000,000.00	1 Paket Rp 15,000,000.00	1 Paket Rp 15,000,000.00	1 Paket Rp 15,000,000.00
	1.10 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC/ Kipas Angin	output Rp.	Pemeliharaan 12 AC Rp 3,000,000.00	1 Paket Rp 4,000,000.00	1 Paket Rp 5,000,000.00	1 Paket Rp 6,000,000.00	1 Paket Rp 7,000,000.00	1 Paket Rp 8,000,000.00
	1.11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor	output Rp.	perawatan 16 peralatan kantor Rp 4,000,000.00	1 Paket Rp 5,000,000.00	1 Paket Rp 7,500,000.00	1 Paket Rp 10,000,000.00	1 Paket Rp 12,500,000.00	1 Paket Rp 15,000,000.00
	1.12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	output Rp.	1 Paket Rp 992,500.00	1 Paket Rp 2,000,000.00	1 Paket Rp 2,000,000.00	1 Paket Rp 2,000,000.00	1 Paket Rp 2,000,000.00	1 Paket Rp 2,000,000.00
	1.13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	output Rp.	3 buah sarana dan prasarana Rp 1,000,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.14 Pengadaan Mebelair	output Rp.	2 unit Rp 8,200,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
		Jumlah	Rp 171,992,500.00	Rp 155,000,000.00	Rp 213,500,000.00	Rp 227,000,000.00	Rp 500,500,000.00	Rp 294,000,000.00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	1.1 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	output Rp.	- -	2 Paket Rp 30,000,000.00	2 Paket Rp 35,000,000.00	1 Paket Rp 25,000,000.00	1 Paket Rp 30,000,000.00	
	1.2 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	output Rp.	18 helai Korpri Rp 7,200,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
		Jumlah	Rp 7,200,000.00	Rp 30,000,000.00	Rp 35,000,000.00	Rp 25,000,000.00	Rp 30,000,000.00	Rp -
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1.1 Pendidikan dan Pelatihan	output Rp.	1 tahun Rp 47,000,000.00	2 Paket Rp 55,000,000.00	2 Paket Rp 57,500,000.00	2 Paket Rp 60,000,000.00	2 Paket Rp 62,500,000.00	2 Paket Rp 65,000,000.00
	1.2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	output Rp.	1 tahun Rp 5,000,000.00	2 Paket Rp 2,000,000.00	2 Paket Rp 2,500,000.00	2 Paket Rp 3,000,000.00	2 Paket Rp 3,500,000.00	2 Paket Rp 4,000,000.00
	1.3 Analisis Jabatan	output Rp.	1 dokumen Rp 6,900,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
	1.4 Penetapan Kinerja	output Rp.	1 dokumen Rp 4,850,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
		Jumlah	Rp 63,750,000.00	Rp 57,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp 63,000,000.00	Rp 66,000,000.00	Rp 69,000,000.00

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KERJA TAHUN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1.1 Penyusunan laporan Keuangan	output Rp.	2 Dokumen Rp 5,800,000.00	2 Dokumen Rp 12,500,000.00	2 Dokumen Rp 13,500,000.00	2 Dokumen Rp 16,500,000.00	2 Dokumen Rp 17,500,000.00	2 Dokumen Rp 20,000,000.00
	1.2 Penyusunan LAKIP	output Rp.	1 Dokumen Rp 7,000,000.00	1 Dokumen Rp 8,000,000.00	1 Dokumen Rp 8,000,000.00	1 Dokumen Rp 8,000,000.00	1 Dokumen Rp 8,000,000.00	1 Dokumen Rp 8,000,000.00
	1.3 Penyusunan RENJA SKPD	output Rp.	1 Dokumen Rp 6,000,000.00	1 Dokumen Rp 7,000,000.00	1 Dokumen Rp 7,000,000.00	1 Dokumen Rp 7,000,000.00	1 Dokumen Rp 7,000,000.00	1 Dokumen Rp 7,000,000.00
	1.4 Penyusuna RKA SKPD TA 2014 dan DPA - SKPD TA 2013	output Rp.	2 Dokumen Rp 12,000,000.00	2 Dokumen Rp 30,000,000.00	2 Dokumen Rp 30,000,000.00	2 Dokumen Rp 30,000,000.00	2 Dokumen Rp 30,000,000.00	2 Dokumen Rp 30,000,000.00
		Jumlah	Rp 30,800,000.00	Rp 57,500,000.00	Rp 58,500,000.00	Rp 61,500,000.00	Rp 62,500,000.00	Rp 65,000,000.00
6. Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa								
	1.1 Penyusunan / Inventarisasi Aset	output Rp.	1 Dokumen Rp 13,945,000.00	- -	- -	- -	- -	- -
		Jumlah	Rp 13,945,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah		Rp 2,150,000,000.00	Rp 3,486,700,000.00	Rp 3,533,600,000.00	Rp 4,280,750,000.00	Rp 4,691,150,000.00	Rp 5,054,800,000.00

MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018

Lampiran IV

Bidang/UPT : Unit Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Pontianak

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan daya saing dan penguatan perdagangan luar negeri	1.1. Dukungan pengujian mutu produk komoditi unggulan daerah	output		4 komoditi	4 komoditi	6 komoditi	6 komoditi	6 komoditi
		Rp.		115,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00	180,000,000.00	200,000,000.00
	1.2. Pengambilan dan Pengujian mutu contoh garam, AMDK, pupuk dan barang beredar lainnya/SNI wajib di pasar pd Kab/Kota	output	14 Kab/ Kota	5 komoditi	5 komoditi	5 komoditi	5 komoditi	5 komoditi
		Rp.	71,926,000	85,000,000.00	95,000,000.00	105,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00
	1.3. Kalibrasi Peralatan Standar Ke Pabrik	output	300 alat standar	300 alat	300 alat	350 alat	350 alat	350 alat
		Rp.	40,339,000	100,000,000.00	115,000,000.00	125,000,000.00	135,000,000.00	150,000,000.00
	1.4 Kaji Ulang Sistem Manajemen ISO 17025 : 2008	output	2 Lab	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Rp.	12,313,500	50,000,000.00	60,000,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00
	1.5 Penyempurnaan Dokumen Mutu Laboratorium	output	2 dokumen					
		Rp.	11,601,000					
	1.6 Pelatihan Teknis Internal Pengujian dan Kalibrasi	output	30 peserta	45 org	45 org	45 org	45 org	45 org
		Rp.	89,735,000	130,000,000.00	150,000,000.00	170,000,000.00	180,000,000.00	200,000,000.00
	1.7 Pengadaan bahan Kimia Untuk Pengujian	output	27 jenis bahan kimia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Rp.		70,650,000	80,000,000.00	85,000,000.00	100,000,000.00	115,000,000.00	125,000,000.00	
1.8 Kalibrasi Peralatan Standar	output	1 paket	10 alat	10 alat	10 alat	10 alat	10 alat	
	Rp.	19,854,000	25,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00	
1.9 Audit Internal Laboratorium	output	1 Lab	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Rp.	9,629,000	15,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00	
1.10 Re-akreditasi Laboratorium	output	1 Lab	1 lab		1 lab	1 lab		
	Rp.	42,007,000	65,000,000.00		75,000,000.00	85,000,000.00		
1.11 Uji Banding/ profisiensi Laboratorium	output	3 parameter	4 komoditi dan 1 UBLK	4 komoditi dan 1 UBLK	4 komoditi dan 1 UBLK	4 komoditi dan 1 UBLK	4 komoditi dan 1 UBLK	
	Rp.	15,858,000	50,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00	
1.12 Surveilen Laboratorium	output	2 Lab	1 lab	2 lab	1 lab	1 lab	2 lab	
	Rp.	62,968,000	50,000,000.00	95,000,000.00	60,000,000.00	65,000,000.00	120,000,000.00	
1.13 Promosi Laboratorium	output							

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	UPSMB	Rp.		100,000,000.00	110,000,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00	140,000,000.00
	1.14 Bimtek Verifikasi Mutu	output		30 peserta		30 peserta		30 peserta
	BOKAR	Rp.		125,000,000.00		135,000,000.00		150,000,000.00
	1.15 Jaminan mutu Internal	output		2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl
	laboratorium	Rp.		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	1.16 Studi Pengelolaan	output		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Laboratorium	Rp.		65,000,000.00	75,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	
Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Export	1.1. Monitoring Mutu Komoditi	output	12 Kab/Kota					
	Tengkawang, Karet/Bokar, Lada dan CPO ke Kab/Kota	Rp.	81,644,000					
Jumlah				528,524,500	1,105,000,000	1,070,000,000	1,360,000,000	1,350,000,000
Palayanan Administrasi Perkantoran	2.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	2,400,000	2,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	2.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	70,500,000	90,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00
	2.3 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah	output	Bangunan Kantor, 1 mobil 4 motor	1 mobil 4 motor	1 mobil 4 motor	1 mobil 4 motor	1 mobil 4 motor	1 mobil 4 motor
		Rp.	6,500,000	8,000,000.00	1,200,000.00	14,000,000.00	16,000,000.00	20,000,000.00
	2.4 Penyediaan Jasa perizinan kendaraan dinas / Operasional	output	5 kendaraan operasional	1 mobil 4 motor	1 mobil 4 motor	1 mobil 4 motor	1 mobil 4 motor	1 mobil 4 motor
		Rp.	1,880,000	2,200,000.00	2,400,000.00	2,600,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00
	2.5 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan	output	560 materai	560 materai	565 materai	570 materai	580 materai	580 materai
		Rp.	2,610,000	2,610,000.00	2,660,000.00	2,710,000.00	2,810,000.00	2,810,000.00
	2.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	output	1 jasa kebersihan kantor	1 jasa kebersihan kantor	1 jasa kebersihan kantor	1 jasa kebersihan kantor	1 jasa kebersihan kantor	1 jasa kebersihan kantor
		Rp.	47,321,500	50,000,000.00	70,000,000.00	7,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	2.7 Penyediaan ATK	output	39 jenis ATK dan 5 jenis kelengkapan komputer	40 jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan komputer	45 jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan komputer	40 jenis ATK dan 6 jenis perlengkapan komputer	40 jenis ATK dan 6 jenis perlengkapan komputer	40 jenis ATK dan 6 jenis perlengkapan komputer
		Rp.	15,812,000	20,000,000.00	22,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
	2.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	output	15 jenis Cetakan dan 30000 lbr Fotocopy	15 jenis cetakan dan 35.000 lbr fc	15 jenis cetakan dan 40.000 lbr fc	15 jenis cetakan dan 40.000 lbr fc	15 jenis cetakan dan 45.000 lbr fc	15 jenis cetakan dan 45.000 lbr fc
		Rp.	19,895,000	22,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
	2.9 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	2,431,000	2,500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
	2.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	output	2 jenis terbitan	2 jenis terbitan	2 jenis terbitan	2 jenis terbitan	2 jenis terbitan	2 jenis terbitan
		Rp.	1,980,000	1,980,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	2.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	14,040,000	15,000,000.00	15,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00
	2.12 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	output	1 jenis perjalanan dinas	2 jenis perdalanan dinas				
		Rp.	140,303,000	150,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
	2.13 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan kantor/Rumah jabatan	output	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
		Rp.	69,900,000	75,000,000.00	81,000,000.00	87,000,000.00	93,000,000.00	100,000,000.00
2.14 Penyedia Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Rp.	57,000,000	60,000,000.00	63,000,000.00	66,000,000.00	69,000,000.00	72,000,000.00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.1 Pengadaan Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	output	1 buah roda dua	1 motor				1 motor
		Rp.	15,000,000	18,000,000.00				18,000,000.00
	3.2 Pengadaan AC/kipas angin	output	1 buah AC	2 buah			2 buah	
		Rp.	5,000,000	18,000,000.00			18,000,000.00	
	3.3 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	output	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah
		Rp.	19,600,000	25,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	3.4 Pengadaan Sarana dan	output	1 paket	1 paket				

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Prasarana Studio dan Komunikasi	Rp.	9,250,000	15,000,000.00				
	3.5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	15,000,000	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	3.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kenderaan Dinas/Operasional	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	19,760,000	20,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
	3.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ac/Kipas Angin	output	12 buah	13 buah	15 buah	15 buah	15 buah	15 buah
		Rp.	3,000,000	3,500,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	3.8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	7,500,000	8,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
	3.9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	output	1 paket	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	15,000,000	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	3.10 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	output	2 paket	3 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
		Rp.	411,734,000	600,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
	3.11 Pengembangan Sistem Informasi	output		1 paket				
		Rp.		30,000,000.00				
	3.13 Pemeliharaan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan	output		2500 m2				
		Rp.						
	3.13 Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telephon	output	1 gedung	1 paket	1 paket			
		Rp.	10,000,000	15,000,000.00	15,000,000.00			
	3.14 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	30,000,000	60,000,000.00	65,000,000.00	650,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
3.14 Pemeliharaan Rutin Berkala generator	output		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Rp.		15,000,000.00	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.1 Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	output		28 stel		28 stel		
		Rp.		9,000,000.00		11,000,000.00		
	4.2 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	output	46 hekal pakaian			28 stel		
		Rp.	8,050,000			6,000,000.00		
	4.3 pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	output			28 org			
		Rp.						

PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
		RUPIAH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Rp.			9,000,000.00			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.1 Pendidikan dan Pelatihan	output	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Rp.	65,445,000	70,000,000.00	75,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
	5.2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	output	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
		output	5,000,000					
	5.3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Rp.	2 semester					
		Rp.	14,755,000	5,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	5.4 Analisis Jabatan	output	1 dokumen	1 dokumen				
		Rp.	6,943,500	8,000,000.00				
	5.5 Penetapan Kinerja	output	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Rp.	6,138,500	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
5.6. Standar Operasional Prosedur	output	1 dokumen						
	Rp.	7,258,500						
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	6.1 Penyusunan Laporan Keuangan	output	2 laporan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
		Rp.	9,073,500	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	6.2 Penyusunan Lakip	output	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Rp.	7,836,500	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	6.3 Penyusunan RENJA SKPD	output	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Rp.	8,281,500	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	6.4 Penyusunan RKA SKPD, DAN DPA SKPD	output	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Rp.	11,902,000	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	7.1 Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset	output	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Rp.	7,375,000	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
Jumlah Belanja rutin			1,171,475,500	1,498,290,000	1,267,560,000	1,824,110,000	1,358,610,000	1,266,810,000
Indikasi keperluan anggaran per tahun UPSMB Pontianak			1,700,000,000	2,603,290,000	2,337,560,000	3,184,110,000	2,708,610,000	2,861,810,000